

EMPAT PILAR KEBANGSAAN PERSPEKTIF

FILSAFAT POLITIK ISLAM



SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Memperoleh gelar S.Ag

Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama

Oleh:

Rusdi Yunus

1431010066

Aqidah dan Filsafat Islam

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2018 M

EMPAT PILAR KEBANGSAAN PERSPEKTIF

FILSAFAT POLITIK ISLAM

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh gelar S.Ag Dalam Ilmu Ushuluddin dan Studi Agama



Pembimbing I : Dr. Himyari Yusuf, M. Hum

Pembimbing II : Muhammad Nur, M. Hum

FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG

1439 H / 2018 M



ABSTRAK
EMPAT PILAR KEBANGSAAN PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK ISLAM
Oleh :
RusdiYunus

Empat pilar kebangsaan adalah dasar negara yang terdiri dari Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945, ini sebagai dasar, pedoman bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan negara republik Indonesia. Sedangkan, filsafat politik Islam adalah salah satu cabang filsafat yang secara khusus membicarakan dan mengkaji tentang politik Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan (1) adakah nilai-nilai fundamental empat pilar kebangsaan? (2) bagaimana nilai-nilai fundamental empat pilar kebangsaan dalam perspektif filsafat politik Islam?. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yang datanya diperoleh dari hasil membaca dan pengumpulan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian, seperti data primer dan data sekunder. Setelah mendapatkan data, kemudian data tersebut diolah dengan menggunakan metode membaca pada tahap simbolik, yakni membaca yang dilakukan tidak menyeluruh melainkan menangkap isi dari data tersebut, membaca pada tingkat semantik, yakni membaca secara terinci, terurai, dan menangkap esensi dari data tersebut. Kemudian data-data tersebut dianalisa dengan menggunakan metode Deskripsi, Interpretasi, dan Heuristika.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka dapat diketahui bahwa, dalam empat pilar kebangsaan terdapat nilai-nilai fundamental seperti nilai, ketuhanan, kemanusiaan, keadilan, persatuan, demokrasi, dan toleransi. Nilai-nilai fundamental di atas satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Kemudian dalam pandangan filsafat politik Islam nilai-nilai fundamental di atas adalah sebagai perwujudan dari pada nilai ketuhanan itu sendiri, pada hakikatnya filsafat politik Islam adalah bagaimana memanusiakan manusia seutuhnya, dengan berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah. Secara definitive dalam pandangan filsafat politik Islam nilai ketuhanan adalah sentral bagi seluruh aktifitas dan kebijakan.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Bandar Lampung Telp. (0721) 703160

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : "Empat Pilar Kebangsaan Perspektif Filsafat Politik Islam"
Nama : Rusdi Yunus
NPM : 1431010066
Prodi : Aqidah dan Filsafat Islam
Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah
Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Himyari Yusuf, M.Hum
NIP. 196409111996031001

Muhammad Nur, M.Hum
NIP. 198104152011011005

Mengetahui
Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam

Dra. Hj. Yusafida Rasvidin, MAg
NIP. 1960081993032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA

Alamat : Jl. Let.Kol.H. Endro Suratmin Bandar Lampung Telp: (0721) 703160

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul: **Empat Pilar Kebangsaan Dalam Perspektif Filsafat Politik Islam**, disusun oleh **Rusdi Yunus, NPM: 1431010066**, Jurusan: **Aqidah dan Filsafat Islam**, Fakultas: **Ushuluddin dan Studi Agama**, telah dimunaqosyahkan pada hari, tanggal: **Jumat, 14 September 2018**.

TIM MUNAQOSYAH

Ketua : **Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., MA.**

(.....)

Sekretaris : **Drs. Ahmad Zaeny, M. Kom.I.**

(.....)

Penguji I : **Prof. Dr. M. Baharudin, M.Hum.**

(.....)

Penguji II : **Dr. Himyari Yusuf, M.Hum.**

(.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama



Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M. Ag.
NIP. 195808231993031001

SURAT PERNYATAAN ORIENTALIS

Assalamualaikum, Wr. Wb

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RusdiYunus

Npm : 1431010066

Jurusan/Prodi : AqidahdanFilsafat Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “EMPAT PILAR KEBANGSAAN PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK ISLAM” adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan tidak ada unsur plagiat, kecuali beberapa bagian yang disebutkan sebagai rujukan di dalamnya. Apabila dikemudian hari dalam skripsi ini ditemukan ketidak sesuaian dalam pernyataan tersebut, maka seluruhnya menjadi tanggung jawab saya dan saya siap menerima segala sanksi yang diakibatkannya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb

Bandar Lampung, 6 September 2018

Rusdi Yunus
1431010066

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA IAIN RADEN INTAN LAMPUNG

Mengenai transliterasi Arab-Latin ini digunakan sebagai pedoman Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/Tahun 1987, sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
	A		Dz		Zh		N
	B		R		‘		W
	T		Z		Gh		H
	Ts		S		F		’
	J		Sy		Q		Y
	<u>H</u>		Sh		K		
	Kh		Dh		L		
	D		Th		M		

2. Vokal

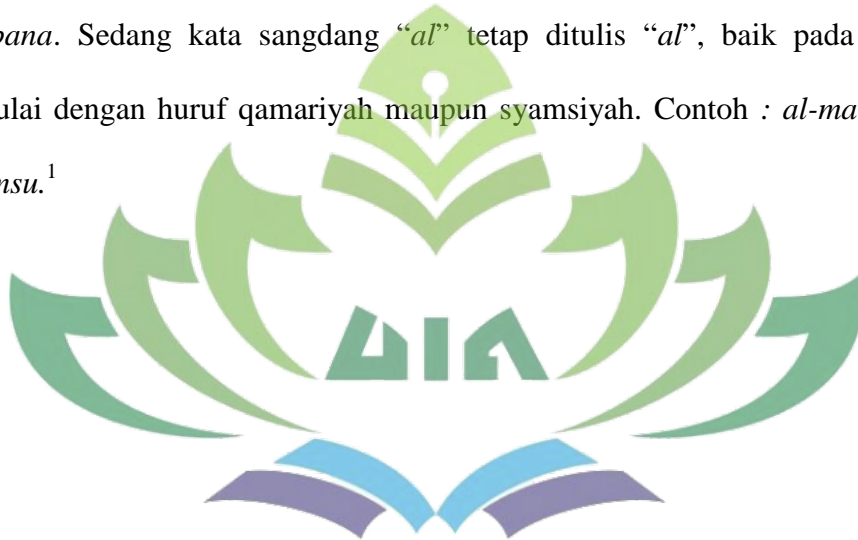
Vokal Pendek		Contoh	Vokal	Panjang	Contoh	Vokal Rangkap	
	A			Â		Ai
	I			Î	قِيلَ	Au
	U			Û	يَجُورَ		

3. Ta Marbuthah

Ta Marbuthah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dhammah, transliterasinya adalah /t/. Sedangkan *ta marbuthah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/. Seperti kata: *Thalhah, Raudhah, Jannatu al-Na'im*.

4. Syaddah dan Kata Sandang

Dalam transliterasi, tanda *syaddah* dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Seperti kata : *nazzala, rabbana*. Sedang kata sandang “*al*” tetap ditulis “*al*”, baik pada kata yang dimulai dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah. Contoh : *al-markaz, al-syamsu*.¹



¹ M. Sidi Ritaudin, Muhammad Ikbāl, Sudarman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa* (Bandar Lampung: IAIN Raden Intan, 2014), h. 20-21.

MOTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

58. *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

“Kamu semua adalah pemimpin dan kamu semua akan bertanggungjawab terhadap apa yang kamu pimpin” (HR. Muttafakun Alaih)



PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah Swt, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya. Shalawat serta salam yang selalu tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad Saw. Dengan penuh rasa syukur dan tulus ikhlas maka skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta (Bapak Juhri dan Ibu Nuryati), yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil. Yang mengasuhku, membesarkanku, membimbing menasehatiku, dan mendo'akan demi tercapainya cita-citaku. Terima kasih Ayah dan Ibu atas jasa, pengorbanan, dan keikhlasan membesarkan aku dengan tulus dan penuh kasih dan sayang.
2. Kakak-kakaku tercinta Muhammad Tambrin beserta istri, Muhammad Didi Turmudi beserta istri, Masriana beserta Suami, adik-adik tercintaku Lismiyati Shalihah dan Dede Mulyana. Yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, semangat dan motivasi serta turut mendo'akan untuk mencapai keberhasilanku.
3. Dosen pembimbing II Dr. Muhammad Nur, M. Hum dan pembimbing I Dr. Himyari Yusuf, M. Hum yang telah banyak memberikan wawasan dan pemikirannya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan ini dengan baik.
4. Sahabat-sahabat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), sahabat-sahabat AFI 2014.

5. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung tempatku menimba ilmu pengetahuan yang kubanggakan.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan kasih sayang dan ampunan-Nya kepada kami. Aamiin



RIWAYAT HIDUP

Rusdi Yunus dilahirkan didesa Harapan Jaya Kec. Kedondong Kab. Pesawaran pada tanggal 13 Maret 1995 Putra ke 4 dari 6 bersaudara dari pasangan ayahanda Juhri dan Ibunda Nuryati.

Jenjang pendidikan pertama di Sekolah Dasar Negeri 3 (SDN 3) Harapan Jaya, tamat pada tahun 2008. Lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP PGRI) Sinar Harapan dan tamat pada tahun 2011. Kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Atas di (SMK PGRI 1) Kedondong dan tamat pada tahun 2014.

Kemudian pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam. Selama kuliah mengikuti organisasi Ekstra Kampus yaitu PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) dan UKM HIQMAH (Himpunan Qori-Qoriah Mahasiswa).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT atas kasih sayang-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **EMPAT PILAR KEBANGSAAN PERSPEKTIF FILSAFAT POLITIK ISLAM**. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi Muhammad Saw, para keluarga, dan sahabat-habatnya.

Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Strata Satu (S1) jurusan Aqidah Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Agama.

Skripsi ini tidak akan terealisasi tanpa adanya bantuan dari semua pihak, baik berbentuk motivasi maupun materi. Untuk itu peneliti ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Moh. Mukri M.Ag. selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta ini.
2. Bapak Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung.
3. Ibu Dra. Hj. Yusafrida Rasyidin, M.Ag, sebagai ketua jurusan Aqidah dan Filsafat Islam, dan bapak Drs. A. Zaeny, M.Kom. I selaku sekertaris

jurusan Aqidah dan Filsafat Islam yang telah memberikan waktunya dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Dr. Himyari Yusuf, M.Hum selaku pembimbing I, Bapak Muhammad Nur M.Hum selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan saran dan sumbangan pemikiran kepada peneliti sehingga dapat tersusunnya skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung yang telah membimbing peneliti selama menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin, khususnya di jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.
6. Para Karyawan dan tenaga administrasi Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung.
7. Pemimpin dan pegawai perpustakaan, baik perpustakaan pusat maupun fakultas.
8. Kedua orang tua, kakak-kakak tersayang dan keluarga besar penulis yang selalu memberikan do'a dan dukungannya.
9. Keluarga besar PMII Rayon Fakultas ushuluddin.
10. Sahabat-sahabatku, Anisa Setiatati, S.Ag, Astiana, S.Ag, Eva Anggraeni Diah, S.Ag, Evi Oktaviani, Fita Etriyani, Firdayatus Sholihah, S.Ag, Hifzon, S.Ag, Iman Ma'arif, Maylinda Sari, S.Ag, Mirzan Huda, S.Ag, Nurhayati, S.Ag, Nurfitriani, S.Ag, Purnomo, Siti Nurjanah, S.Ag, Zomi Satriadi, S.Ag dan mbaku Tri Etika Istirohatun. Terimakasih atas dukungan, semangat, dan motivasinya. Semoga Allah selalu meridhoi kita

dalam menjalin silaturahmi dalam bingkai persaudaraan yang penuh kasih sayang.

11. Sahabat-sahabat keluarga besar AFI 2014 Wuri Indayani, Sri, S.Ag, Nelia Sari, S.Ag, Rosnawati, Agung, Reza, Sofian, Deva Yulianti, Woko dedianto, Mariani, Fauzan, Ari ginanjar, Ahmad Lahoya, Aprida Sari, S.Ag, Festi dan Rahmat Fazri, S.Ag. Semoga Allah selalu memudahkan semua urusan mereka dalam mewujudkan setiap cita-cita mereka. Aamiin
12. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempatku menempuh studi dan menimba ilmu pengetahuan.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan, dan peneliti akhiri dengan memanjatkan do'a semoga segala amal baik kita diterima sebagai Ibadah dan senantiasa menunjukan jalan yang benar. Amiiin.

Bandar Lampung, 7 September 2018

RusdiYunus
NPM:1431010066

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN ORIENTALIS.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	5
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
F. Metode Penelitian.....	15
G. Tinjauan Pustaka	21
BAB II FILSAFAT POLITIK ISLAM	22
A. Pengertian Filsafat Politik Islam	22
B. Ruang Lingkup Filsafat Politik Islam	25
C. Dasar-Dasar Filsafat Politik Islam	26
D. Karakteristik Filsafat Politik Islam	29
E. Sejarah dan Urgensi Filsafat Politik Islam di Indonesia	33

BAB III NILAI DAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN	41
A. Pengertian Nilai.....	41
B. Pancasila.....	43
C. Bhineka Tunggal Ika	51
D. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).....	52
BAB IV NILAI-NILAI EMPAT PILAR KEBANGSAAN DAN FILSAFAT	
POLITIK ISLAM	54
A. Nilai-nilai Fundamental Empat Pilar Kebangsaan	54
B. Nilai-nilai Fundamental Empat Pilar Kebangsaan dalam Perspektif Filsafat Politik Islam	66
BAB V PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	105
DARTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 01. Kartu Konsultasi

Lampiran 02. Sk Dekan Fakultas Ushuluddin Dan Studi Agama Uin Raden Intan
Lampung



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian yang akan diteliti berjudul **“Empat Pilar Kebangsaan Perspektif Filsafat Politik Islam”**. Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca peneliti berasumsi bahwa judul diatas memerlukan penjelasan, adapun penjelasannya sebagai berikut:

Empat pilar kebangsaan adalah Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila adalah dasar filsafat negara Republik Indonesia yang diresmikan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945.¹ Rumusan lima nilai dasar sebagaimana yangtercantum didalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah:

1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹ Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta, Paradigma, 2014), h. 1.

Kelima sila tersebut adalah sebagai satu kesatuan nilai dasar kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan suatu perjanjian luhur yang harus dijadikan pedoman oleh bangsa Indonesia.²

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan pemersatu bangsa Indonesia. Ungkapan Bhineka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam *Kitab Sutasoma* yang ditulis oleh Mpu Tantular pada abad XIV di masa kerajaan Majapahit. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis “*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhineka rakwa ring apan kena parwanosen, mangka ng jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*” (Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua).³ Dalam arti ke Indonesiaan bahwa Bhineka Tunggal Ika yang lebih signifikan yang kita kenal adalah “*berbeda-beda tapi satu*”.

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah bahwa bangsa dan negara Indonesia terdiri atas berbagai macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu pedoman bangsa atau negara Indonesia adalah berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kesatuan sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945.⁴ Negara kesatuan bukan

² Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2012), h. 44-45.

³*Ibid*, h. 181.

⁴*Op. Cit*, h. 143.

dimaksudkan merupakan suatu kesatuan dari negara bagian (federasi) melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsur-unsur negara yang bersifat fundamental.⁵ Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkedaulatan rakyat. Ditegaskan kembali bahwa “*Negara Indonesia adalah negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia*”.⁶

Undang-Undang dasar menempati tata urutan peraturan yang tertinggi didalam negara. Dalam konteks institusi negara, konstitusi bermakna permakluman tertinggi yang menetapkan antara lain pemegang kedaulatan tertinggi, struktur negara, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kekuasaan legislatif, kekuasaan peradilan dan berbagai lembaga negara serta hak-hak rakyat.⁷ Undang-Undang adalah sebuah bentuk peraturan negara yang harus ditaati oleh segenap bangsa Indonesia, agar menjadikan dinamika dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya.⁸

Perspektif adalah sudut pandang, pandangan. Dalam kamus bahasa Indonesia perspektif adalah cara melukiskan suatu benda pada permukaan yang mendatar sebagaimana yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar, tingginya).

Filsafat politik adalah cabang filsafat yang khusus membicarakan kehidupan politik, kajian filsafat politik yang paling signifikan membicarakan

⁵*Ibid*, h. 142.

⁶*Ibid*, h. 143.

⁷*Op. Cit*, h. 117.

⁸*Ibid*, h. 119.

tentang hakikat, asal mula, dan nilai-nilai negara.⁹ Pengertian politik menyangkut kenegaraan, oleh karena itu filsafat politik membicarakan tentang hal-hal yang berhubungan dengan negara.¹⁰ Oleh sebab itu pengkajian politik harus berdasarkan tujuan-tujuan yang menjadi pedoman negara yaitu Pancasila. Filsafat politik Islam membicarakan kehidupan politik dengan nuansa keislaman yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits.

Bagi Plato filsafat politik adalah usaha mencapai pengetahuan politik atau kebijaksanaan politik.¹¹ Kebijakan politik merupakan hal yang paling esensial untuk bangsa dan negara, agar tidak ada lagi kekerasan dan kerusuhan politik yang bisa menghancurkan politisi dan negara seperti pada sebelum dan sesudah proklamasi.

Dari penjelasan istilah-istilah diatas, yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah peneliti akan mengkaji dan meneliti nilai-nilai empat pilar kebangsaan dalam perspektif filsafat politik Islam. Karena banyaknya nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan, maka peneliti tidak berpretensi membahas keseluruhan dari empat pilar kebangsaan. Maka dalam penelitian ini akan peneliti batasi dari beberapa pilar saja. seperti, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia).

⁹ Muhammad Baharudin, *Dasar Dasar Filsafat*, (Bandar Lampung, Harakindo Publishing, 2013), h. 27.

¹⁰ Sutono, *Filsafat Soaial Dan Politik Pancasila*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1985), h. 3.

¹¹ Varma, *Teori Politik Modern*, (Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 134.

B. Alasan Memilih Judul

Penulis mengangkat judul ini untuk dibahas atau diteliti karena banyak sumber yang mendukung keberhasilan penelitian ini, oleh karena itu penulis tertarik kepada judul skripsi ini:

1. Karena empat pilar kebangsaan adalah persoalan yang sangat penting untuk dibahas, karena empat pilar kebangsaan adalah pedoman bangsa dan falsafah Negara Indonesia, yang harus selalu ada dalam jiwa bangsa Indonesia.
2. Karena filsafat politik Islam sangat menekankan bagaimana cara mengatur negara dengan mengedepankan syariat-syariat Islam.
3. Karena tema pokok penelitian ini sangat relevan dengan disiplin ilmu yang penulis pelajari di jurusan Aqidah dan Filsafat Islam.

C. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri Indonesia sebagai negara-bangsa adalah kebesaran, keluasan dan kemajemukannya. Sebuah negara-bangsa yang mengikat lebih dari 1.128 (seribu seratus dua puluh delapan) suku bangsa (data BPS) dan bahasa, ragam agama dan budaya di sekitar 17.508 (tujuh belas ribu lima ratus delapan) pulau (citra satelit terakhir menunjukan 18.108 pulau).¹² Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk yang bervariasi bahasa daerahnya, suku bangsanya, seni budayanya, agama kepercayaannya, adat istiadatnya, dan kebiasaannya.¹³

Bangsa yang besar ini berdiam sejak berabad-abad dari sabang sampai merauke. Dipeta dunia kepulauan Indonesia tampak sangat cantik karena dari

¹²*Op. Cit*, h. 1.

¹³ Inu Kencana Syafie, *Filsafat Politik*, (Bandung, Mandar Maju, 2005), h. 57.

barat sampai ketimur berjejer pulau-pulau dengan komposisi dan konstruksi yang indah, mulai dari pulau Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, pulau-pulau Nusa Tenggara, pulau-pulau Maluku dan Irian Jaya.¹⁴ Nama Indonesia sendiri berasal dari bahasa latin *indus* dan *nesos* yang berarti India dan pulau-pulau. Karena memang Indonesia merupakan sebutan yang diberikan untuk pulau-pulau yang ada di samudra Hindia dan itulah yang dimaksud sebagai satuan pulau yang kemudian disebut Indonesia.¹⁵

Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang sebelum dan sesudah kedatangan bangsa-bangsa barat. Bangsa Indonesia telah hidup bernegara yang dilatar belakangi oleh kerajaan-kerajaan besar yang ada di Indonesia seperti: Sriwijaya dan Majapahit dll. Dalam masa kerajaan Majapahit dan Sriwijaya disebut sebagai masa kejayaan nasional, zaman keemasan, sebagai simbol/lambang kebesaran bangsa Indonesia.¹⁶ Mengenai sejarah nusantara ini, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa *kita hanya dua kali mengalami nationale staat, yaitu di jaman Sriwijaya dan di jaman Majapahit nationale staat hanya Indonesia seluruhnya, yang telah berdiri di jaman Sriwijaya dan Majapahit dan kini pula kita harus dirikan bersama-sama.*¹⁷

Kerajaan Majapahit adalah cikal-bakal negara Indonesia. Majapahit yang keberadaannya sekitar abad XIII sampai abad XV adalah kerajaan yang besar yang sangat berjaya, terlebih pada masa pemerintahan Mahapatih Gajah Mada. Gajah

¹⁴*Ibid*, h. 57.

¹⁵*Op. Cit*, h. 149.

¹⁶ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1992), h. 23.

¹⁷*Op. Cit*, h. 150.

Mada adalah Mahapatih Majapahit yang disegani, dia lah yang berhasil menyatukan nusantara yang terkenal dengan “Sumpah Palapa” (sumpah yang menyatakan tidak akan pernah istirahat atau berhenti berpuasa sebelum nusantara bersatu).¹⁸

Kehidupan agama menunjukkan persatuan, terutama agama Buddha dan Hindu. Samudra Pasai yang penduduknya telah memeluk agama Islam, masuk dalam daerah kekuasaan Majapahit. Dengan demikian toleransi antar pemeluk agama dijunjung tinggi dan menunjukkan keadaan yang positif. Dalam bidang sosial budaya menunjukkan kemajuan misalnya kita mengenal *Negara Kertagama*, *Arjuna Wiwaha* dan *Sutasoma*. Dalam *Sutasoma* karangan Empu Tantular dikenal semboyan yang kemudian menjadi semboyan kehidupan bangsa Indonesia, yaitu *Bhinneka Tunggal Ika* (walaupun berbeda tetapi satu jua).¹⁹

Meski demikian, sejarah juga mencatat bahwa kejayaan kerajaan Majapahit yang berumur lumayan lama sekitar 2 abad harus berakhir setelah wafatnya patih Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mengalami perpecahan dengan ditandai lepasnya kerajaan-kerajaan yang semula berada dalam kekuasaan Majapahit menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Setelah berakhirnya masa kerajaan di Indonesia masuklah bangsa Barat seperti Portugis dan Spanyol terus disusul oleh bangsa Belanda pada abad XVI tepatnya 1596.

Belanda cukup berhasil menguasai Indonesia, mereka mengeruk keuntungan sebesar-besarnya sementara rakyat Indonesia ditelantarkan dan

¹⁸*Ibid*, h. 150-151.

¹⁹*Op. Cit*, h. 25-26.

mengalami penderitaan lahir dan batin. Belanda melakukan dominasi politik, eksploitasi ekonomi, dan melakukan rakyat Indonesia dengan sewenang-wenang. Belanda menerapkan politik “adu domba” dan melakukan diskriminasi rasial kepada rakyat Indonesia.

Kondisi rakyat Indonesia yang semakin parah akibat penjajahan tersebut mengakibatkan adanya suatu perlawanan yang dipimpin oleh para tokoh perjuangan seperti Sultan Ageng Tirtayasa, Cik Dik Tiro, Teuku Umar, Sultan Hasanuddin, Imam Bonjol, Panglima Polim, dan Pangeran Diponegoro. Namun perlawanan tersebut mengalami kegagalan karena memang pada waktu itu kesadaran nasional dan perjuangan belum terpupuk, sehingga perlawanan pada waktu itu masih bersifat kedaerahan.

Perlawanan terhadap penjajah belanda terus dilakukan, secara fisik maupun politik. Munculnya kesadaran para pejuang dan golongan terpelajar Indonesia serta keadaan internasional yang menimbulkan pergerakan di kalangan negara-negara terjajah, pada 20 Mei 1908 di Jakarta berdirilah Boedi Oetomo yang didirikan oleh dr. Soetomo dan kawan-kawan dengan ketuanya Dr. Wahidin Sudiro Husodo.²⁰ Dan kemudian ditetapkan sebagai hari kebangkitan nasional. Awalnya organisasi ini bergerak dalam soal-soal pendidikan, pengajaran dan kebudayaan dan kemudian bergerak kedalam lapangan politik, dengan masuknya Budi Utomo dalam Dewan Rakyat menjadi anggota pemufakatan

²⁰ *Op. Cit*, h. 152-153.

Partai-Partai politik Indonesia. Tujuan Budi Utomo adalah menjamin kehidupan sebagai bangsa yang terhormat.²¹

Kemerdekaan Indonesia tidak terlepas dari perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari penjajahan bangsa barat. Dan salah satu bagian perjalanan yang perlu dimaknai secara mendalam adalah tentang cita-cita bangsa adalah sebagai mana pidato Bung Karno tentang lahirnya Pancasila dalam persidangan pertama BPUPKI tanggal 1 juni 1945, menyebutkan istilah jembatan emas.²² Yang menawarkan lima prinsip dari dasar negara yang diberi nama Panca Sila. Rumusan Soekarno kemudian digodok melalui panitia delapan dan kemudian membentuk panitia Sembilan yang menyempurnakan Pancasila dari pidato Soekarno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada 22 juni 1945. Kemudian pengesahan atau final rumusan Pancasila yang kemudian di sahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.²³

Pada tanggal 17 Agustus 1945 jam 10.00 WIB, Indonesia mengumandangkan Proklamasi kemerdekaannya keseluruh dunia. Sejak dari Proklamasi kemerdekaan tersebut, sejarah mencatat bahwa bangsa-negara Indonesia merupakan bangsa yang masih muda dalam menyusun politik pemerintahan. Landasan berpijaknya adalah konstitusi dan ideologi yang mereka ciptakan sendiri yang di tetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945.²⁴

²¹ *Op. Cit*, h. 32.

²² Backy Krisnayuda, *Pancasila Dan Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), h. 2.

²³ *Op. Cit*, h. 28.

²⁴ *Op. Cit*, h. 62.

Sedangkan Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan, perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan (pegangan hidup) atau bisa juga kita artikan sebagai slogan atau moto.²⁵ Pengertian Bhineka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua. Memang tulisan Mpu Tantular ini diberikan penafsiran baru oleh pendiri bangsa karena relevan dengan keperluan strategis bangunan Indonesia merdeka yang terdiri dari beragam agama, kepercayaan, ideologi politik, etnis, bahasa dan budaya.²⁶

NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh UUD 1945 (Pasal 25A).²⁷ Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik Pasal 1 ayat 1. Negara kesatuan republik Indonesia merupakan bentuk negara yang dipilih sebagai komitmen bersama para pendiri bangsa Indonesia.

Negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewujudkan ide persatuan sebuah bangsa yang mejemuk ditinjau dari berbagai latar belakang.

Negara kesatuan adalah suatu negara yang hanya mempunyai satu pusat pemerintahan yang mengatur seluruh daerah, tidak ada negara dalam negara, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara

²⁵ Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, Edisi Revisi, 2017), h. 67.

²⁶ Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2014-2019, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2017), h. 183.

²⁷ *Op. Cit.*, h. 63.

bersangkutan.²⁸ Sedangkan Undang-Undang adalah sebuah bentuk peraturan negara yang harus ditaati oleh segenap bangsa Indonesia, agar menjadikan dinamika dan proses penyelenggaraan pemerintahan dan Negara dapat dibatasi dan dikendalikan sebagaimana mestinya.²⁹

Pancasila adalah dasar negara yang mana dasar ini dijadikan sebagai pedoman untuk mengatur pemerintahan negara.³⁰ Menurut penulis dari semua konstitusi yang ada di negara kita ini sumber hukum yang mengatur negara ini adalah berasal dari pancasila, baik itu UUD 1945, NKRI, Bhineka Tunggal Ika. Relevan dengan penjelasan Yudi Latif yang dikutip oleh Himyari Yusuf, ia menjelaskan bahwa. Pancasila adalah dasar yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun yang dinamis dan mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya, maka pancasila merupakan sumber jatidiri, kepribadian, moralitas dan haluan keselamatan bangsa.³¹ Dapat penulis simpulkan dari empat pilar yang sudah penulis kemukakan di atas, bahwa adapun nilai-nilai yang terkandung adalah sebagi berikut.

1. Nilai Ketuhanan
2. Nilai Kemanusiaan
3. Nilai Persatuan
4. Nilai permusyawaratan/perwakilan
5. Nilai Keadilan sosial

²⁸ *Ibid*, h. 62.

²⁹ *Op. Cit.*, h. 119.

³⁰ *Op. Cit.*, h. 9.

³¹ Himyari Yusuf, *Dasar-Dasar Aksiologi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Filsafat Politik Islam*, (Bandar Lampung, An-Nuur Press, 2013), h. 6.

Bahwa dalam kacamata filsafat politik Islam nilai ketuhanan merupakan titik yang sangat menentukan, bahkan dipastikan hanya dengan berdasarkan nilai ketuhanan itulah seluruh aktifitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan tujuan serta hakikat kemanusiaan.³² Sedangkan nilai kemanusiaan sendiri mengandung makna, adanya sebuah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia dengan segala hak dan kewajibannya, selain itu adanya perlakuan yang adil terhadap sesama manusia, diri sendiri, alam sekitar dan terhadap Tuhan.³³ Karena pada hakikatnya manusia dihadapan Tuhan adalah sama tidak ada perbedaan, kecuali, ketakwaan dan kepatuhannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam hal ini Indonesia adalah negara yang pluralistik dimana di dalamnya terdapat perbedaan-perbedaan, seperti agama, ras, budaya, bahasa dll. Sehingga nilai kemanusiaan ini menjadi penting untuk mewadahi keberagaman tersebut dalam menjalankan roda perpolitikan. Sehingga tercapai cita-cita dan tujuan bersama, dengan kata lain bangsa yang bersatu.

Tidak kalah penting juga nilai persatuan, karena seperti yang penulis kemukakan di atas bahwa negara Indonesia adalah negara yang pluralistik. Dalam pandangan filsafat politik Islam nilai kesatuan atau persatuan ini tidak terikat kepada satu etnis, agama tertentu saja, tetapi untuk semua umat manusia, semua kedudukan sama dan setara.³⁴ Intinya jangan menjadikan sebuah perbedaan

³² *Ibid*, h. 160.

³³ Idrus Ruslan, *Negara Madani Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, (Yogyakarta, Suka Press, 2015), h. 237.

³⁴ *Op. Cit.*, h. 169.

menjadi suatu halangan untuk bersatu dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Keadilan sosial dalam perakteknya sudah dicontohkan Rasulullah SAW ketika di Madinah yang kita kenal “Piagam Madinah”. Misalnya keadilan sosial ini pada masa nabi menjadi prioritas utama. Karena di Madinah seperti di Indonesia terdapat keberagaman, budaya, suku, dan agama. Maka nilai persatuan dalam kacamata filsafat politik Islam harus diimplementasikan dalam kehidupan manusia, dalam tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁵

Nilai musyawarah, menurut Soejadi yang dikutip oleh Idrus Ruslan, nilai musyawarah mengandung arti antara lain: negara adalah untuk kepentingan rakyat, kedaulatan ada ditangan rakyat, seluruh warga negara mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Serta keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat oleh wakil-wakil rakyat.³⁶ Dalam kacamata filsafat politik Islam musyawarah adalah untuk menyatukan pandangan serta menentukan kebenaran. Karena tanpa kesatuan pandangan, maka tidak ada jaminan untuk mewujudkan kesatuan dan kesamaan. Yang lebih penting adalah bahwa kebenaran yang disepakati bersama niscaya bersumber dari nilai ke-Tuhanan.³⁷

Bertitik tolak dari penjelasan latar belakang di atas yang menjadi pertanyaannya adalah adakah nilai-nilai empat pilar kebangsaan? Hal ini akan dijawab dipembahasan berikutnya. Karena begitu banyaknya nilai-nilai yang

³⁵ *Ibid*, h. 170-171.

³⁶ *Op. Cit.*, h. 249.

³⁷ *Op. Cit.*, 184.

terkandung di dalam empat pilar kebangsaan, maka peneliti tidak berpretensi membahas keseluruhan dari nilai-nilai empat pilar kebangsaan. Maka penelitian ini akan peneliti batasi dari beberapa pilar, seperti pilar Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) Dengan pertimbangan. *Pertama*, akan membutuhkan waktu yang cukup lama, ini merugikan bagi peneliti. *Kedua*, kurangnya pengetahuan peneliti.

Melalui kacamata filsafat politik Islam seperti yang sudah dijelaskan di atas. Peneliti akan mengkaji nilai-nilai empat pilar kebangsaan dalam perspektif filsafat politik Islam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, fokus persoalan yang akan ditemukan jawabannya dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Adakah Nilai-nilai Fundamental dalam Empat Pilar Kebangsaan?
2. Bagaimana Nilai-nilai Fundamental Empat Pilar Kebangsaan dalam Perspektif Filsafat Politik Islam?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Untuk mengetahui hakikat dannila-nilai empat pilar kebangsaan.
2. Agar dapat mengetahui empat pilar kebangsaan dalam perspektif filsafat politik Islam.

Adapun penelitian dengan judul “Empat Pilar Kebangsaan Perspektif Filsafat Politik Islam” ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut

1. Merubah pola pikir masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan.
2. Terciptanya keinginan untuk menjadi bangsa yang bermoral dan berlandaskan falsafah bangsa.

F. Metode Penelitian

Metode penulisan adalah cara yang dipakai dalam mengumpulkan data. Dalam hal ini digunakan metode deskriptif analitis yaitu menggambarkan konsep pemikiran, kemudian dianalisis dengan mengambil kesimpulan kesimpulan yang dianggap relevan. Untuk melengkapinya digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka atau yang sering disebut *Library Research*. Penelitian kepustakaan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur yang diperlukan dan dipelajari.³⁸ Untuk mendapatkan data yang diperlukan akan diambil dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.³⁹ Penelitian ini memiliki objek material yakni Filsafat Politik Islam sedangkan objek formalnya adalah Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika.

b. Sifat Penelitian

³⁸ Anton Bakker, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Jakarta, KANISIUS, 1990), h. 64.

³⁹ M. Ahmadi Anwar, *Prinsip-prinsip Metodologi Reaserch*, (Yogyakarta, Sumbangsih, 1975), h. 2.

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif filosofis yakni penelitian yang memaparkan dan melaporkan suatu keadaan, objek tertentu kemudian dianalisis secara lebih kritis.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka yang paling penting ialah mencari sumber data, serta catatan-catatan yang serupa dan berhubungan dengan penelitian, peneliti melakukan dengan mengambil buku-buku serta catatan-catatan yang kemudian diseleksi, karena melalui bacaan dan catatan tersebut dapat menetapkan manakah bahan-bahan yang benar-benar diperlukan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Yang menjadi sumber primer disini adalah buku Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, yang berjudul *“Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara”*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2012). Buku Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, yang berjudul *“Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI”*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, Edisi Revisi, 2017). Buku Dr. Himyari Yusuf, M.Hum yang berjudul *“Dasar-Dasar Aksiologi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam*

Perspektif Filsafat Politik Islam”, (Bandar Lampung, An-Nuur Press, 2013)

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber aslinya. Data sekunder berkaitan dengan buku-buku atau referensi yang dapat dijadikan sumber rujukan dan memang ada kaitannya dengan masalah yang peneliti bahas yaitu Empat Pilar Kebangsaan dalam Perspektif Filsafat Politik Islam. Buku Drs. H. Inu Kencana Syafie, Msi yang berjudul *“Al-Quran dan Ilmu Politik”*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996). Buku Drs. Ayi Sofyan, yang berjudul *“Etika Politik Islam”*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012). Buku Dr. Ali Abdul Mu’ti Muhammad, yang berjudul *“Filsafat Politik Antara Islam dan Barat”*, Terjemah, Rosihon Anwar, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2010). Jurnal Dr. Himyari Yusuf, M.Hum yang berjudul *“Eksistensi dan Karakteristik Politik Islam Suatu Inspirasi Bagi Formulasi Politik Kontemporer”*, (Jurnal Tapis, Vol, 10 No. 1 Januari-Juni 2014). Buku Ir Sukarno, yang berjudul *“Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno”*, (Yogyakarta, Media Pressindo, 2017). Buku Drs. Kaelan, M.S. yang berjudul *“Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan”*, (Yogyakarta, Paradigma, 1999). Buku Dr. H. Syahrial Syarbaini, yang

berjudul *“Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa)”*, (Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2012). Buku Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. yang berjudul *“Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi”*, (Yogyakarta, Paradigma, 2016). Buku Dr. Rozikin Daman, yang berjudul *“Pancasila Dasar Falsafah Negara”*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1992). Buku H. Sunoto, yang berjudul *“Filsafat Sosial Dan Politik Pancasila”*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1985). Buku Drs. H. Inu Kencana Syafie, Msi. Yang berjudul *“Filsafat Politik”*, (Bandung, Mandar Maju, 2005).

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data ini peneliti akan memulai dengan cara membaca data-data yang berkaitan dengan objek penelitian, dan pergi ke perpustakaan, toko buku, pusat studi, pusat penelitian dan juga melalui internet, baik secara menyeluruh maupun substansi.⁴⁰

4. Metode Pengolahan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengolahan data ini adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti terlebih dahulu mengumpulkan buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan objek penelitian. kemudian

⁴⁰ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta, Paramadina, 2005), h. 65.

- b. Membaca pada tahap simbolik yakni membaca yang dilakukan secara tidak menyeluruh terlebih dahulu, melainkan menangkap isi dari buku, bab yang menyusunnya, sub bab hingga bagian terkecil lainnya.⁴¹
- c. Membaca pada tingkat semantik yakni membaca secara terinci, terurai dan menangkap esensi dari data tersebut.⁴² Dan kemudian mencatat data pada kartu data baik secara Quotasi (mencatat data dari sumber data dengan mengutip langsung tanpa ada perubahan kata-kata), secara Paraphrase (menangkap inti sari data dan menuangkannya dalam bahasa peneliti).

5. Metode Analisis Data

Analisis data ialah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan beberapa macam metode analisa, diantaranya:

- a. Metode deskripsi

Metode ini merupakan salah satu unsur hakiki untuk menemukan bentuk uraian atau cerita pada suatu fenomena.⁴³ Memahami serta menggambarkan empat pilar kebangsaan, kemudian dilihat dari sudut pandang filsafat politik Islam.

- b. Metode Interpretasi

⁴¹ *Ibid*, h. 157.

⁴² *Ibid*, h. 157.

⁴³ Kaelan, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta, Paradigma, 2005), Cet. 1, h. 68.

Metode Interpretasi adalah menafsirkan, membuat tafsiran tetapi yang tidak bersifat subjektif melainkan harus bertumpu pada evidensi objektif, untuk mencapai kebenaran otentik.⁴⁴ Interpretasi di sini bahan atau data-data yang sudah dideskripsikan, kemudian diinterpretasikan dan dianalisis kembali untuk menunjukan dan memperjelas tentang empat pilar kebangsaan secara objektif, runtut, komprehensif, dan mendasar.

c. Metode Heuristika

Berdasarkan bahan baru atau pendekatan baru, diusahakan menemukan pemahaman baru atau interpretasi baru.⁴⁵ Penggunaan unsur metodis heuristika karena peneliti ini mengkaji nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan, yang menjadi dasar bagi bangsa Indonesia.

6. Metode Penerikan Kesimpulan

Setelah peneliti mengumpulkan data, reduksi data dan klarifikasi data, kemudian dilakukan analisis data dengan cara menyimpulkan berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dengan induktif dan deduktif yang disebut lingkaran hermeneutika. Namun perlu diketahui bahwa proses penyimpulan data bukan untuk melakukan generalisasi, melainkan untuk mewujudkan suatu konstruksi

⁴⁴ *Ibid*, h. 145.

⁴⁵ *Loc. Cit.*, h. 65.

teoritis, dengan melalui pengetahuan intuitif untuk menemukan suatu kejelasan kontruksi logis.

Proses induktif dan deduktif diterapkan berdasarkan data-data yang telah terkumpul dan dilakukan analisis, yaitu melalui suatu sintesis dan penyimpulan melalui penafsiran berbagai gejala, peristiwa, simbol, nilai yang terkandung dalam ungkapan bahasa, atau kebudayaan yang muncul pada fenomena kehidupan manusia.

G. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun proposal, dan sebelum penyusun melangkah lebih jauh dalam membahas permasalahan ini, penyusun terlebih dahulu meneliti buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan permasalahan yang penyusun bahas.

1. Skripsi yang ditulis oleh Akhmad Syapari *“Islam Dan Pancasila” dalam tinjauan konsepsional tentang integrasi bangsa* (95197363) Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Dan Filsafat. Berisikan hubungan dan nilai-nilai Islam dan Pancasila serta metode dalam mengatur kenegaraan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Ubay Haqie *“Islam dan filsafat negara pancasila dalam perspektif Deliar Noer”* (9419043) Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah dan Filsafat. Berisikan tentang bagaimana pimpinan Islam menerima pancasila sebagai dasar

negara Republik Indonesia, dan bagaimana pancasila menurut pandangan Daliar Noer.

3. Skripsi yang ditulis oleh Ginda Riana “*Nilai-nilai Humanisme dalam Filsafat Pancasila*” (1231010085) Fakultas Ushuluddin Jurusan Aqidah Filsafat. Berisikan tentang bagaimana warga negara Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.



BAB II

FILSAFAT POLITIK ISLAM

A. Pengertian Filsafat Politik Islam

Filsafat politik Islam adalah salah satu cabang dari filsafat yang secara khusus mengkaji tentang politik Islam. Istilah filsafat politik Islam terdiri dari dua kata, yaitu filsafat dan politik Islam.¹ Secara etimologi, istilah filsafat berasal dari berbagai bahasa, yaitu antara lain bahasa Inggris dan Yunani. Filsafat dalam bahasa Inggris adalah *philosophy* sedangkan dalam bahasa Yunani, filsafat berasal dari kata *philein* “cinta” atau *philos* “mencintai, menghormati, menikmati” dan *shophia* atau *sofein* yang berarti kenikmatan, kebenaran, kebaikan, kebijaksanaan atau kejernihan. Oleh karena itu filsafat atau berfilsafat adalah mencintai menikmati kebijaksanaan atau kebenaran.²

Sedangkan politik Islam adalah bagaimana nilai-nilai Islam dapat ditegakkan dalam kehidupan dengan berporos pada keadilan. Ini artinya perjuangan politik Islam tidak selalu harus berbentuk partai politik, karena memang untuk mewujudkan terciptanya nilai-nilai keislaman dapat dilakukan disegenap lini kehidupan.

Pertama-tama politik Islam mengaitkan kepentingan terhadap negara dengan kenyataan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya secara sendirian. Karena itu, negara sebagai bentuk kerja sama sosial menjadi sesuatu kemestian, dengan menjadikan wahyu (agama) sebagai pedoman

¹ Himyari Yusuf, *Dasar-Dasar Aksiologi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Filsafat Politik Islam*, (Bandar Lampung, An-Nuur Press, 2013), h. 27.

² *Ibid*, h. 29.

atau rujukan. Tujuannya agar manusia mencapai kebahagiaannya baik secara material maupun spiritual (dunia dan akhirat).³

E. Herman Khairon yang dikutip oleh Himyari Yusuf mengemukakan bahwa Islam merupakan agama universal yang memberikan pedoman pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya tentang kehidupan bernegara (politik). Dalam kehidupan bernegara, Islam memberikan pedoman dengan amat global, seperti diajarkan prinsip-prinsipnya saja, guna memberikan kesempatan bagi interpretasi (filsafat) sesuai dengan kehidupan manusia yang senantiasa berkembang.⁴ Berbeda dengan Islam politik. Islam politik adalah upaya sekelompok orang dengan menggunakan simbol-simbol Islam untuk kepentingan meraih kekuasaan demi kepentingan pribadi dan kelompoknya.

Politik dalam bahasa Arabnya disebut *Siyasah* atau dalam bahasa Inggrisnya “*politic*”. Politik itu sendiri berarti cerdik dan bijaksana. Memang dalam pembicaraan sehari-hari kita seakan mengartikan politik sebagai suatu cara yang dipakai untuk mewujudkan tujuan.⁵

Untuk melaksanakan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum yang menyangkut pengaturan, pembagian atau alokasi dari

³ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, (Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2013), h. 4.

⁴ *Op. Cit.*, h. 34.

⁵ Inu Kencana, *Al-Quran dan Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1996), h. 74.

sumber-sumber dan *resources* yang ada. Namun demikian tujuan-tujuan itupun harus dari seluruh masyarakat, dan bukan tujuan pribadi seseorang.⁶

Asal mula kata politik sendiri berasal dari kata “*polis*” yang berarti “Negara Kota” dengan politik berarti ada hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan itu timbul aturan, kewenangan, dan akhirnya kekuasaan.⁷ Sedangkan filsafat politik adalah cabang filsafat yang khusus membicarakan yang bersangkutan dengan kehidupan politik, khususnya dengan hakikat, asal mula, dan nilai-nilai negara.⁸

Ringkasnya dapat dikemukakan, bahwa filsafat politik Islam adalah berfikir secara menyeluruh, mendalam, radikal, dan rasional tentang hakikat dan kehidupan manusia yang sesuai dan tidak bertentangan dengan Islam.⁹ Selain pengertian filsafat politik Islam di atas, juga dapat dipahami bahwa secara esensial filsafat politik Islam adalah strategi untuk memanusiakan manusia, atau untuk mengkonkretisasi hakikat kemanusiaan secara utuh dan menyeluruh dalam segala aspek kehidupan praktis manusia.

Hakikat kemanusiaan yang sejatinya secara reflektif merupakan penjelmaan dari dimensi material dan spiritual (kemanusiaan dan ketuhanan), oleh karena itu pada hakikatnya filsafat politik Islam tidak akan pernah bertentangan atau menentang

⁶ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 8.

⁷ *Op. Cit.*, h. 75.

⁸ Muhammad Baharudin, *Dasar-Dasar Filsafat*, (Bandar Lampung, Harakindo Publishing, 2013), h. 27.

⁹ *Loc. Cit.*, h. 35.

Tuhan apalagi meniadakan Tuhan seperti yang terjadi pada politik lainnya (politik sekuler dan liberalis). Filsafat politik Islam niscaya mengkaji strategi penegakan kebenaran dan pencegahan kemungkaran yang sejalan dengan kesejatan manusia seutuhnya, yaitu manusia meliputi dimensi material (jasadiyah) dan spiritual (ruhaniyah).¹⁰

B. Ruang Lingkup Filsafat Politik Islam

Secara implisit ruang lingkup filsafat politik Islam terpetakan pada pembahasan di muka. Bahwa secara esensial filsafat politik Islam adalah mengkaji mengenai strategi untuk memanusiakan manusia, atau untuk mengkonkretisasi hakikat kemanusiaan secara utuh dan menyeluruh ke dalam segala aspek kehidupan praktis umat manusia. Artinya filsafat politik Islam tergolong filsafat khusus. Dikatakan filsafat khusus karena filsafat politik filsafat Islam khusus mengkaji strategi atau cara-cara memanusiakan manusia secara sempurna yang berdasarkan ajaran Islam, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai ketuhanan.

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa ruang lingkup kajian filsafat politik Islam adalah mengkaji strategi untuk menyelamatkan manusia dari pola pikir dan perilaku yang dapat menyesatkan, baik itu terkait dengan sistem pemerintahan, termasuk dalam hal-hal kehidupan berbangsa dan bernegara. Filsafat politik Islam mengkaji tentang bagaimana harmonisasi dan dinamisasi kehidupan manusia secara keseluruhan, seperti hubungan penguasa negara, pemerintahan negara, dengan rakyat

¹⁰ *Ibid*, h. 36.

sebagai warganegara, dan sebagainya yang seluruhnya dalam rangka untuk mewujudkan kesamaan, kebersamaan, keadilan, dan kesejahteraan bersama.

C. Dasar-Dasar Filsafat Politik Islam

Jika landasan ontologis filsafat politik Islam adalah *monodualisme* sebagaimana dikemukakan di atas, maka landasan epistemologis filsafat politik Islam tergolong dalam *korelasionisme* yaitu suatu aliran epistemologi yang menempatkan dimensi dan potensi dasar manusia sebagai sumber yang permanen bagi struktur filsafat politik Islam.

Herman Khairon yang dikutip oleh Himyari Yusuf menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh Allah sebagai pengemban amanat, antara lain amanat tersebut adalah agar manusia memakmurkan kehidupan di bumi, oleh karena itu manusia diberikan kedudukan sebagai *khalifatullah* atau wakil Allah di bumi.¹¹ Seperti firman Allah dalam al-Quran (Q.S. Al-An'am: 165) yang artinya:

*“Dan dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di bumi dan dia mengangkat derajat sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas karunia yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat member hukuman dan sungguh, dia Maha Pengampun, Maha Penyayang”.*¹²

Ditambahkan pula bahwa pemerintahan negara menurut ajaran Islam wajib tunduk kepada al-Quran. al-Quran-lah yang harus menjadi landasan utama dalam menentukan batas-batas kewajiban dan hak, baik bagi pemerintahan terhadap

¹¹ *Ibid*, h. 38.

¹² Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012), h. 15.

rakyatnya, maupun antara sesama warga antar negara.¹³ Karena di dalam al-Quran terkandung sejumlah prinsip politik berupa keadilan, musyawarah, toleransi, hak-hak dan kewajiban, *amar ma'ruf* dan *nahi munkar*, kejujuran, serta penegakan hukum.¹⁴

Selain itu, praktik politik nabi Muhammad SAW Juga dapat menjadi *sunah* dalam penyelenggaraan pemerintahan Islam. Dua sumber normatif ini menjadi dokumen yang menyajikan bagaimana nabi dan Khulafa' Ar-Rasyidin melakukan politik pemerintahan di dalam sejarah Islam.

Sejarah politik Islam adalah sejarah dakwah, dalam menabur dan menyebarkan *amar ma'ruf nahi munkar* (menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran). Oleh karena itu pemerintahan Islam sejak masa nabi Muhammad SAW di madinah pada 622 M hingga Khulafa Ar-Rasyidin yang berakhir pada sekitar 656 M merepresentasikan sebuah upaya menegakan kebajikan di muka bumi.¹⁵ Artinya sumber filsafat politik Islam itu meliputi potensi dasar yang ada pada diri manusia, seperti indra, akal, dan intuisi (hati), termasuk al-Quran dan Sunnah Rosul-Nya, dan semuanya bersifat koherensi, integratif dan holistik (korelasionisme).¹⁶

Tegasnya dapat dikemukakan bahwa kedudukan pimpinan atau kepala negara adalah mengemban amanah Tuhan dan oleh karena itu harus bertanggungjawab kepada Tuhan, juga harus bertanggungjawab kepada masyarakat. Kedua arah pertanggungjawaban tersebut secara reflektif merupakan pancaran dari hubungan

¹³ *Op. Cit.*, h. 38.

¹⁴ *Op. Cit.*, h. 15.

¹⁵ *Ibid*, h. 16.

¹⁶ *Op. Cit.*, 39.

(ibadah) vertikal manusia dengan Allah, dan hubungan (ibadah) horizontal manusia dengan manusia. Inilah yang dimaksud bahwa manusia harus memakmurkan bumi dalam bingkai ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

Dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut, selain merujuk kepada pesan-pesan al-Quran dan Sunnah Rasul, sesungguhnya manusia telah diberi oleh Allah potensi dasar; yaitu indrawi, akal dan hati (intuisi). Potensi dasar tersebut tentunya berfungsi sebagai alat untuk mengkonkretisasi pesan-pesan yang ada dalam falsafah Ilahi yang terkandung dalam al-Quran. Artinya penglihatan, pendengaran, pikiran dan hati nurani bekerja sama secara seimbang dan sinergis, dan tidak boleh bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya.

Dengan kata lain harus ada suatu harmonisasi yang mendasar antara potensi dasar yang diberikan Allah kepada manusia dengan wahyu (al-Quran) yang diturunkan kepada Rasul-Nya. Dalam konteks ini tentunya al-Quran harus dipahami sebagai satu kesatuan antara ayat-ayat Qauliyah, Kauniyah dan Nafsiyah, dan tidak dipahami secara parsial dan sempit sebagaimana yang dilakukan oleh sekelompok orang dewasa ini. Dan hampir semua filosof berpandangan sama, bahwa sumber politik kekuasaan tertinggi adalah Tuhan pencipta alam semesta.¹⁷ Seperti Ibnu Taimiyah, pemikiran Ibnu Taimiyah tentang politik sangat menekankan pentingnya membangun politik diatas landasan agama.

Artinya, politik yang berdiri di atas landasan agama atau pemerintahan yang disandarkan pada kaidah-kaidah dan ajaran-ajaran agama adalah sesuatu paling ideal

¹⁷ *Ibid*, h. 40-41.

yang akan mengembalikan umat Islam kepada kemuliaan, kekuatan dan kesatuan.¹⁸ Artinya seluruh strategi dan kebijakan harus mengalir dan bersumber dari yang tetinggi (agama), sehingga akan bermuara pada pembumian nilai-nilai spiritualitas, religiusitas dan moralitas.¹⁹

D. Karakteristik Filsafat Politik Islam

Henry J. yang dikutip oleh Himyari Yusuf mengatakan, dalam perspektif filsafat politik, bahwa politik tidak hanya mencakup pengelolaan masalah publik saja, tetapi politik juga mencakup aspirasi, tujuan, keyakinan dan nilai-nilai manusia yang berkaitan teori dan peraktek, keterampilan filosofis dan teknis. Jika demikian ranah politik, maka dapat diinterpretasikan bahwa politik itu bersifat integratif antara pengelolaan masalah publik dengan tujuan dan keyakinan serta nilai-nilai kemanusiaan. Dengan ini bahwa politik secara filosofis berkarataristik kemanusiaan, karena politik harus bergerak menuju kepada singgasana tujuan hidup manusia, keyakinan yang ada di dalam hidup manusia dan aktualisasinya nilai-nilai kemanusiaan.

Sedangkan eksistensi politik tidak lain adalah untuk menyelamatkan manusia dan kemanusiaan dari kungkungan birahi yang menggelapkan atau yang menjadi penghalang kemanusiaan yang sejati.²⁰ Perjalanan sejarah politik Islam telah mengalami pasang surut dan sekaligus masing-masing menunjukkan karakteristik

¹⁸ Ali Abdul Mu'ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Islam dan Barat*, Terjemah, Rosihon Anwar, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2010), h. 396.

¹⁹ *Op. Cit.*, h. 41.

²⁰ *Ibid*, h. 43.

yang berbeda-beda.²¹ Namun demikian menurut Toha Hussein yang dikutip oleh Imam Wahyuddin menjelaskan, untuk memahami politik Islam harus kembali ke peraktek nabi Muhammad SAW, atau mengambil pelajaran dari dua Khalifah Islam pertama, yaitu Abu Bakar Siddiq dan Umar Bin Khatthab, karena pada kedua sahabat ini belum terjadi perpecahan.

Menurut Toha Hussein inti dari peraktek nabi dan dua sahabat tersebut sangat sederhana, bahwa nabi menjalankan apa yang disebut prinsip keadilan. Menerapkan keadilan tanpa pandang bulu, dalam arti menerapkan keadilan dengan seadil-adinya di tengah masyarakat. Ini adalah misi al-Quran selain misi Tauhid, nabi mengajak pada persamaan, bahwa tidak ada manusia yang lebih unggul dari manusia lain kecuali taqwanya. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin, yang kuat dan yang lemah, semua harkat dan martabat manusia dihadapan Allah adalah sama. Dengan ini pada tatanan esensial manusia adalah sama, oleh karena itu manusia harus hidup dalam kebersamaan, kekeluargaan, dan kerukunan.²²

Menurut Himyari Yusuf bahwasanya perjalanan sejarah politik Islam telah mengalami pasang surut, dan pada setiap era menunjukkan karakteristiknya masing-masing. Politik pada masa nabi misalnya konsisten terhadap apa yang diperintahkan Allah melalui Wahyu-nya, dan politik pada masa Khulafa Ar-Rasyiddin, selain sesuai dengan Wahyu, juga mengikuti apa yang telah Rasul contohkan.²³

²¹ Himyari Yusuf, *Eksistensi dan Karakteristik Politik Islam Suatu Inspirasi Bagi Formulasi Politik Kontemporer*, (Jurnal Tapis, Vol, 10 No. 1 Januari-Juni 2014), h. 104.

²² *Op. Cit.*, h. 44.

²³ *Ibid*, h. 45.

Muhammad Iqbal dan Amin Husein yang di kutip oleh Himyari Yusuf, membagi sejarah Islam kepada tiga periode, yaitu periode klasik (1250 M), pertengahan (1250-1800 M), dan modern (1800 M) sampai sekarang. Dari masing-masing periode memiliki karakteristik dan ciri khas yang berbeda-beda. Misalnya politik Islam pada periode klasik dan pertengahan ditandai oleh paham atau pandangan yang bersifat *khalifah*. Secara esensial pemahaman ini menganggap *khalifah* atau pemimpin negara adalah segala-galanya, masyarakat harus tunduk dan patuh kepada pemimpin secara total tanpa terkecuali.²⁴

Penekanan yang semacam ini dilakukan dengan alasan untuk stabilitas masyarakat sehingga keadaan negara benar-benar aman. Karakteristik politik Islam semacam ini diperkirakan berjalan cukup lama atau paling tidak selama berlakunya system kerajaan di dunia Islam yaitu pada masa Daulah Umayyah, Abbasiyah dan Usmaniyah.²⁵

Namun tampilan karakteristik politik Islam ini memungkinkan membahayakan umat manusia, yang mungkin saja bisa terjadi, menganggap bahwa perkataan pemimpin negara dianggap sama dengan perkataan tuhan. Sehingga dapat menjadi pemimpin yang kebal hukum dan tidak boleh dikritik oleh siapapun, pada akhirnya apapun yang diinginkan oleh pemimpin pantang untuk ditolak atau tidak boleh memberikan masukan walaupun masukan itu lebih baik.

²⁴ *Op. Cit.*, h. 104.

²⁵ *Ibid*, h. 45.

Secara definitif karakteristik semacam ini sangat bertentangan dengan hakikat dan kodrat kemanusiaan, dan sekaligus, dan sekaligus paradigma politik semacam ini sangat bertentangan atau tidak sejalan dengan tampilan karakteristik politik nabi dan Khulafa Ar-Rasyiddin seperti yang telah dijelaskan di atas. Berikutnya adalah periode modern.

Secara filsafati politik Islam pada periode modern juga menunjukkan sosok wajah politik yang buram. Pada periode ini hampir seluruh wilayah Islam berada pada genggaman penjajahan (imperialisme) barat, dan barat tidak hanya menguasai negara-negara Islam saja, tetapi juga menerapkan system politik, ekonomi dan hukum yang sekuler di dunia Islam. Dengan demikian dapat kita interpretasikan bahwa karakteristik politik Islam periode modern telah mengesampingkan manusia universal dan terlalu memfokuskan kepada manusia individual yang berorientasi material. Karakteristik semacam ini sangat tidak koheren dengan hakikat kemanusiaan.²⁶

Demikian ciri khas atau karakteristik politik Islam dalam pespektif filsafat, bahwa pelaksanaan perpolitikan niscaya bersumber dari al-Quran dan Sunnah nabi, yang berarti politik dan pelaksanaan politik tidak pernah bebas dari nilai-nilai ketuhanan (nilai-nilai spiritualitas-religiusitas) dan nilai-nilai kemanusiaan (humanis-teosentris).

Dalam sistem politik Islam hanya satu orientasi yaitu untuk menegakkan kebenaran, dan keadilan, sekaligus dalam rangka membumikan Islam secara luas,

²⁶ *Ibid*, h. 46.

serta untuk keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Musyawarah sebagai cerminan, kesamaan, kebersamaan, dan kerukunan serta kekeluargaan selain itu, musyawarah adalah perintah al-Quran dan as-Sunnah, itu semua sesuai dengan fitrah, kodrat, martabat dan hakikat manusia sebagai makhluk sosial dan individual.²⁷

E. Sejarah dan Urgensi Filsafat Politik Islam di Indonesia

1. Sejarah filsafat politik Islam di Indonesia

Dalam sejarah bangsa Indonesia, umat Islam telah menunjukkan peranan yang cukup signifikan dalam usaha membebaskan bangsa dari imperialisme Eropa. Dinamika politik umat Islam telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka.²⁸ Setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan serta gagasan untuk mencari sintesis ideologi. Proses ini ditandai dengan kemunculan berbagai organisasi pergerakan.²⁹ Seperti kelahiran Serikat Dagang Islam (SDI) pada 16 Oktober 1905, (SI) Serikat Islam, yang berdiri 11 November 1912. Ini adalah bentuk kebangkitan bangsa terhadap kekuasaan pemerintah belanda pada waktu itu. Pendiri SDI Kiai Haji Samanhoedi menyerukan kepada seluruh umat Islam Indonesia untuk bersatu.³⁰

²⁷ *Ibid*, h. 52.

²⁸ Syarifuddin Jurdi, *Pemikiran Politik Islam Indonesia*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008), h. 152.

²⁹ Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2014-2019, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2017), h. 27.

³⁰ *Op. Cit*, h. 152.

Salah seorang pemimpin SI terkemuka Agus Salim yang dikutip oleh Syarifuddin Jurdi mengemukakan, bahwa tujuan SI adalah untuk mendirikan suatu aturan dunia yang kemudian membawa kepada kebersamaan dan kebahagiaan bagi seluruh manusia. Menurutnya tujuan itu akan tercapai jika susunan dunia sekarang diubah. Kemudian perilaku penindasan yang dilakukan oleh Belanda kepada penduduk Indonesia, dalam perspektif SI merupakan sesuatu yang bertentangan dengan misi besar Islam dan kemanusiaan, karena misi kemanusiaan adalah bagaimana mencapai kebahagiaan dan keselamatan hidup yang kekal dan abadi di akhirat nanti.³¹

Dominasi SI sebagai satu-satunya partai politik prakemerdekaan berakhir pada tahun 1920-an. Ketika petinggi partai tersebut melakukan berbagai tindakan yang tidak pantas, sikap sombong, dan membangun konflik dengan gerakan-gerakan kultul. Pada dekade 1930-an mulailah muncul partai-partai baru seperti Majelis Islam A'la Indonesia (MAI) dan Partai Islam Indonesia (PII).³² Kemudian Partai Nasional Indonesia (PNI), dan Partai Serikat Islam Indonesia (PSII).³³ Kemudian setelah Indonesia merdeka, umat Islam kembali mengadakan konsolidasi politik, dengan mengadakan Kongres pertama setelah Indonesia merdeka di Gedung Muallimin Muhammadiyah Yogyakarta. Yang kemudian terjadi kesepakatan untuk mendirikan partai politik Islam yang diberi nama Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi).

³¹ *Ibid*, h. 154.

³² *Ibid*, h. 158.

³³ *Op. Cit.*, h. 27.

Partai inilah yang kemudian menyatukan umat Islam di Indonesia pada saat itu. Sebab setelah itu, meskipun banyak upaya yang dilakukan untuk menyatukan kembali kekuatan Islam, upaya tersebut selalu mengalami kegagalan, entah karena apa? Mungkin karena aliran politik atau karena kepentingan serta motivasi politik yang lain.³⁴

Didirikannya Masyumi bertujuan menjadikan negeri “*Baldatul thoyibatun, wa rabbun ghafur*” negara yang berkeadilan serta terlaksananya ajaran dan hukum Islam, demokrasi, *tasamuh* (toleransi), keadilan sosial, serta terjaminnya hak asasi manusia yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.³⁵ Secara historis persatuan umat Islam lewat partai politik tersebut berlangsung sangat singkat, karena PSII menarik diri dari Masyumi pada tahun 1947, dan kemudian diikuti dengan keluarnya NU dari Masyumi pada tahun 1952. Penarikan NU dari Masyumi ini sangat mengganggu Masyumi, dimana NU memiliki banyak masa yang besar terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah.³⁶

Kemudian pada Orde Lama sekitar (1959-1966). Kekuatan politik Islam semakin melemah, dan banyak dirugikan oleh kebijakan-kebijakan presiden Soekarno. Seperti kebijakan demokrasi terpimpin, dan membubarkan Masyumi (1960). Sebaliknya, tiga partai Islam lainnya, seperti NU, PSII, dan Perti, berusaha menyesuaikan diri dengan kebijakan-kebijakan Soekarno

³⁴ *Op. Cit*, h. 165.

³⁵ *Ibid*, h. 166.

³⁶ *Ibid*, h. 168.

sehingga ketiga partai tersebut bisa bertahan lama. NU adalah partai terbesar diantara ketiganya karenanya dianggap sebagai pendukung utama setiap kebijakan Soekarno. Begitu eratnya hubungan Soekarno dengan NU, seakan-akan Soekarno dan NU tidak dapat dipisahkan, Karena diantara keduanya saling membutuhkan. Bahkan NU bersama partai lainnya yang mendukung kebijakan Soekarno tentang demokrasi terpimpinnya, mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup pada 18 Mei 1963.³⁷ Tentu ini sudah penyimpangan dari Undang-Undang Dasar 1945.

Pada Orde Baru sekitar tahun 1973, kebijakan penyederhanaan partai politik dari 10 partai menjadi 3 partai, seperti partai PPP (Partai Persatuan Pembangunan), merupakan gabungan dari partai NU, Permusi, PSII, dan Perti. PDI (Partai Demokrasi Indonesia), merupakan gabungan dari partai PNI, Parkindo, Katholik, Murba, dan IPKI. Dan Golongan Karya (Golkar).³⁸ Ini merupakan kebijakan pemerintah pada waktu itu. Kemudian konsolidasi politik umat Islam melalui partai politik (PPP dan Golkar) berjalan dengan baik, serta menyusun program meng-Islam-kan birokrasi dengan memasukkan sejumlah ilmuwan Islam yang memiliki kapasitas dan kredibel, salah satunya yaitu Amien Rais. Langkah ini sebagai upaya untuk memberikan nilai-nilai

³⁷ Ikadianhumairohsuparyat “ Politik Islam Era Orde Lama” (On-line), tersedia di: <https://ikadianhumairohsuparyat.wordpress.com> (25 Juli 2013).

³⁸ “Politik dan Islam: Orde Baru dan Era Reformasi” (On-line), tersedia di: retorics.blogspot.com (28 Februari 2015).

keislaman dalam setiap kebijakan negara. Artinya setiap kebijakan negara diharapkan tidak merugikan kepentingan umat Islam.³⁹

Kemudian pasca pengunduran diri Soeharto 21 Mei 1998 merupakan awal dari pembangunan kembali sistem politik yang demokratis. Melalui gerakan perlawanan rakyat, dan mahasiswa sebagai motor utamanya, Rezim Orde Baru ini tumbang. Kehadiran era baru ini menurut umat Islam merupakan sesuatu yang baik, yang tadinya umat Islam merasa dimarginalkan oleh Rezim Orde Baru ini, berubah menjadi momen bagi umat Islam untuk menciptakan serta menyelenggarakan kepentingan-kepentingan umat Islam.⁴⁰

Pada era reformasi ini bermunculan partai Islam atau partai yang berbasis dukungan umat Islam. Seperti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Serikat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Nahdhtul Ummat (PNU), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan lain sebagainya. Fenomena serta dinamika partai politik Islam ini merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keberagaman kepentingan kelompok Islam. Kelahiran partai-partai politik ini merupakan buah euforia politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi.⁴¹ Dari penjelasan di atas begitu masipnya dinamika umat Islam, melalui partai-partai politik untuk terselenggaranya nilai-nilai Islam di negara tercinta ini.

³⁹ *Loc. Cit.*, 178.

⁴⁰ *Ibid*, h. 182.

⁴¹ *Ibid*, h. 187.

Mengingat umat Islam adalah sebagai mayoritas, semestinya aspirasi dan kepentingan umat Islam terakomodasi dalam sistem hukum dan negara.

Penulis tidak begitu lengkap memaparkan dan menjelaskan latar belakang munculnya filsafat politik Islam dari berbagai pemikiran, dan sejarah, Yang menjadi Objek permasalahan dari kemunculan filsafat politik Islam. Karena, jika penulis menjelaskan secara lengkap itu akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Sehingga asumsi penulis memasukkan satu tokoh saja sudah cukup mewakili.

2. Urgensi Filsafat Politik Islam di Indonesia

Kemudian yang menjadi pertanyaannya adalah, pentingkah filsafat politik Islam di Indonesia? Barang kali sudah peneliti katakan bahwa negara Indonesia adalah negara yang paling beragam, di dalamnya terdapat berbagai etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama. Ini merupakan kekayaan bagi bangsa Indonesia yang mesti dijaga. Indonesia juga memiliki falsafah hidup, dasar negara yaitu Pancasila. Pancasila inilah yang kemudian menyatukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang bersatu, dan menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Islam merupakan sebuah sistem keyakinan, agama yang tidak bertentangan dengan pandangan kehidupan modern, karena itu Islam akan dapat berinteraksi dengan dunia yang terus mengalami

perkembangan, termasuk interaksi antara Islam dengan perpolitikan yang ada di Indonesia.⁴²

Sejalan dengan keberagaman di atas, filsafat politik Islam mempunyai peranan penting bagi bangsa Indonesia, karena filsafat politik Islam adalah strategi untuk memanusiakan manusia, serta mewujudkan hakikat kemanusiaan secara utuh.⁴³ Oleh karena itu kehidupan politik ini menjadi penting dalam kehidupan manusia, karena tanpa politik kehidupan manusia akan mengalami kekacauan.⁴⁴

Jika filsafat politik Islam dihadapkan dengan keberagaman yang ada di Indonesia tentu akan memunculkan pengaruh yang positif bagi bangsa Indonesia. Dimana filsafat politik Islam sangat mengedepankan nilai-nilai ke-Tuhanan serta nilai kemanusiaan, secara definitif filsafat politik Islam tidak akan bertentangan dengan agama maupun dengan dasar negara republik Indonesia (Pancasila), serta tujuan-tujuan bangsa Indonesia.

Menurut Ibnu Khaldun yang dikutip oleh Himyari Yusuf, bahwa kehidupan politik ini sangat penting dan menentukan. Politik juga yang mengajarkan suatu mekanisme yang harus digunakan manusia untuk mencapai keselamatan bersama dunia dan akhirat.⁴⁵ Kemudian Herman Khaeron berpendapat bahwa Islam adalah agama universal yang telah

⁴² *Ibid*, h. 50.

⁴³ *Loc. Cit.*, h. 36.

⁴⁴ *Loc, Cit.*, h. 108.

⁴⁵ *Ibid*, h. 108.

disempurnakan, yang memberikan pedoman atau dasar secara menyeluruh, baik dalam bidang sosial, negara, hukum, dan sebagainya.⁴⁶

Pernyataan di atas mengisyaratkan bahwa politik Islam akan membawa manusia kepada jalan keselamatan dan kesejahteraan, baik yang bersifat lahiriyah maupun yang batiniyah.⁴⁷ Eksistensi filsafat politik Islam seperti yang sudah dijelaskan di atas, secara esensial filsafat politik Islam merupakan usaha manusia untuk bekerjasama dalam memenuhi kebutuhan, serta mempertahankan kehidupan dari gangguan baik dari luar maupun dari dalam, yang ingin menghancurkan negara kesatuan republik Indonesia.



⁴⁶ Herman Khaeron, *Etika Politik, Paradigma Politik Bersih, Cerdas, Santun Berbasis Nilai Islam*, (Bandung, Nuansa Cendikia, 2013), h. 261.

⁴⁷ *Op. Cit*, h. 108.

BAB III

NILAI DAN EMPAT PILAR KEBANGSAAN

A. Nilai

Mengacu kepada arti pentingnya nilai di dalam kehidupan manusia istilah nilai dapat mempunyai arti atau makna yang bermacam-macam. Macam-macam itu antara lain sebagai berikut:

1. Mengandung nilai (artinya, berguna).
2. Merupakan nilai (artinya baik atau benar atau indah).
3. Mempunyai nilai (mempunyai kualitas yang dapat menyebabkan orang mengambil sikap menyetujui, atau mempunyai sifat nilai tertentu).
4. Member nilai (artinya, menanggapi sesuatu sebagai hal yang diinginkan atau sebagai hal yang menggambarkan nilai tertentu).

Dari macam-macam makna nilai tersebut tampak dengan jelas bahwa nilai mempunyai kaitan atau menyangkut dengan bidang yang sanagt luas. Jelasnya, dalam arti kegunaan, maka ada kaitannya dengan nilai *pragmatis* atau *utility*, hal tersebut menjadi titik sentral di dalam filsafat *pragmatisme* ataupun *utilitarisme*, yaitu aliran-aliran filsafat yang berkembang di Amerika Serikat dan Inggris. Nilai dalam arti baik atau benar hal ini berkaitan dengan etika.¹ Karena etika memberikan salah satu kebutuhan manusia, hal yang paling fundamental adalah orientasi, karena sebelum

¹ Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, (Yogyakarta, Lukman Offset, 1999), h. 21

kita melakukan sesuatu apa pun kita harus mencari tau orientasi terlebih dahulu, agar kita tahu dimana sebenarnya kita berada, dan kearah mana kita bergerak untuk mencapai tujuan kita.²

Sebagaimana telah diketahui bahwa masalah baik dan buruk hal itu juga menjadi perhatian di dalam hukum, seperti yang di kemukakan oleh Notohamidjojo yang di kutif oleh Soejadi, menyatakan bahwa hukum berpihak kepada kebaikan dan menolak kejahatan. Secara esensial etika memang penting untuk dijadikan dasar etis untuk penegakan hukum yang memang akan mudah diterima oleh masyarakat luas. Dalam maknanya nilai sebagai sesuatu itu indah, hal ini berhubungan dengan filsafat keindahan (estetika), untuk masalah nilai sendiri ini menjadi pembicaraan dalam suatu cabang filsafat yaitu aksiologi.³

Meskipun demikian ada baiknya disinggung pula di sini untuk memperkaya pandangan-pandangan tentang nilai. Menurut Flew yang dikutip oleh Soejadi memberikan pengertian tentang nilai.⁴ Sebagai berikut. Bahwasanya karakteristik nilai itu meliputi 3 macam yaitu:

1. baik (*good*).
2. berharga atau dapat memenuhi keinginan (*desirable*).
3. penting (*important*).⁵

² Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta, PT Kanisius, 1987), h. 13

³ *Op. Cit.*, h. 21

⁴ *Ibid*, h. 22

⁵ *Ibid*, h. 23

Menurut Heri dan Jumanta nilai adalah suatu kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia.⁶ Walaupun begitu menurut pandangan Yuris tentang nilai yang dikutip oleh Soejadi. Berpendapat bahwa dalam kehidupan manusia nilai-nilai banyak ragam dan macamnya, ada nilai hukum, ada nilai kekeramatan dan sebagainya.

Pilar adalah sebuah tiang penyangga untuk bangunan, sama dengan halnya bangunan sebuah negara wajib memiliki pilar yang kokoh supaya negara tersebut tidak mudah roboh atau hancur dan tergoyahkan dengan mudah. Setiap negara pasti mempunyai pilar dan setiap negara pilarnya berbeda satu dengan yang lainnya. Contohnya negara Indonesia. Indonesia memiliki empat pilar yaitu Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, NKRI dan UUD 1945. Pilar ini bertujuan supaya negara Indonesia tidak mudah pecah dan runtuh saat menghadapi sebuah masalah.

B. Pancasila

Pancasila adalah dasar statis yang mempersatukan sekaligus bintang penuntun (*Laitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya serta sebagai sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.⁷

Istilah pancasila dalam kehidupan bangsa Indonesia bukanlah sesuatu hal yang baru. Yaitu terdapat dalam buku *Negarakertagama* karangan Empu Prapanca, dan dalam buku *Sutasoma* karangan Empu Tantular. Dalam buku *Sutasoma* ini istilah

⁶ Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, (Jakarta, Erlangga, 2010), h. 15

⁷ Idrus Ruslan, *Negara Madani Aktualisasi Nila-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, (Yogyakarta, Suka Press, 2015), h. 225.

pancasila di samping mempunyai arti “berbatu sendi yang lima” ia pun berasal dari bahasa sanskerta; Panca berarti lima dan sila berarti berbatu sendi, alas atau dasar, juga berarti “pelaksanaan kesusilaan yang lima”.⁸

Adapun rumusan lima dasar pancasila sebagaimana yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁹ Dan dasar inilah yang dijadikan oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara, yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Bangsa Indonesia harus bangga memiliki pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat bangsa Indonesia yang demikian besar dan mejemuk. Pancasila adalah konsensus nasional yang dapat diterima semua paham, golongan, dan kelompok masyarakat di Indonesia.

Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun (*leitstar*) yang dinamis, yang mengarahkan bangsa dalam mencapai tujuannya. Dalam posisinya seperti itu, pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa.¹⁰ Adapun pengertian pancasila menurut para ahli sebagai berikut:

a. Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli

⁸ Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1992), h. 1.

⁹ Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2012), h. 44.

¹⁰ *Ibid*, h. 12.

1. Ir. Soekarno

Pancasila adalah fondasi negara yang bisa mengkekalkan bangsa Indonesia dalam persatuan. Pancasila bukan hanya falsafah negara melainkan juga falsafah bangsa Indonesia.¹¹

2. Muhammad Yamin

Pancasila ialah kata yang berasal dari kata panca yang berarti lima dan sila yang berarti sendi, jadi pancasila ialah 5 sendi yang menjadi dasar dan peraturan untuk mengatur tingkah laku masyarakat menjadi lebih baik.¹²

3. Kartohadiprodjo

Pancasila merupakan sebuah pandangan hidup atau *world view* yang juga dapat dinamakan juga filsafat. Pancasila adalah filsafat bangsa yang sesungguhnya berhimpit dengan jiwa bangsa.¹³

4. Ruslan Abdulgani

Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai *collective ideology* (cita-cita bersama) seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena pancasila merupakan hasil

¹¹ Ir Sukarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, (Yogyakarta, Media Pressindo, 2017), h. 98.

¹² Estriana Fiwka, "5 Pengertian Pancasila Menurut Para Ahli" (On-line), tersedia di: <http://www.masterpendidikan.com> (23 January 2017).

¹³ Slamet Sutrisno, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, (Yogyakarta, Hak Cipta, 2006), h. 67.

perenungan yang mendalam yang dilakukan oleh the *founding father* kita, kemudian dituangkan dalam suatu “sistem” yang tepat. Menurut Notonagoro, filsafat pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah, yaitu tentang hakikat pancasila.¹⁴

b. Sejarah Singkat Lahirnya Pancasila

Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi bangsa dan negara Indonesia. Bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh seseorang sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia. Namun terbentuknya pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia.¹⁵ Sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya berjalan berabad-abad, dengan banyak macam cara serta tahapan perjuangan dalam merumuskan pancasila sebagai dasar negara. Maka perlulah ditetapkan tonggak-tonggak sejarah tersebut, yaitu peristiwa-peristiwa yang menonjol, terutama dalam hubungannya dengan perumusan pancasila.

Menurut Mr. Muhammad Yamin, berdirinya negara kebangsaan Indonesia tidak dapat dipisahkan dengan kerajaan-kerajaan lama yang merupakan warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Adapun kerajaan-kerajaan tersebut adalah kerajaan Sriwijaya di Sumatra Selatan pada abad VII-XII dan kerajaan Majapahit di Jawa Timur pada abad XIII-XVI.

¹⁴ Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, (Jakarta, Erlangga, 2010), h. 8.

¹⁵ Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta, Paradigma, 1999), h. 53.

Kedua zaman itu merupakan tonggak sejarah bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia pada masa itu telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu bangsa yang mempunyai negara. Kedua kerajaan itu telah merupakan negara-negara berdaulat, bersatu, serta mempunyai wilayah yang meliputi seluruh nusantara ini. Pada zaman tersebut, kedua kerajaan itu telah mengalami kehidupan masyarakat yang sejahtera.¹⁶ Bahkan kata pancasila sendiri yang kita kenal sebagai dasar negara seperti yang sudah penulis bahas dalam bab sebelumnya. Bahwasanya kata pancasila terdapat dalam buku *Negarakertagama* karangan Empu Prapanca, dan dalam buku *Sutasoma* karangan Empu Tantular yang hidup di zaman kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Majapahit.

Proses sejarah konseptualisasi pancasila melintasi perjalanan yang lumayan panjang, setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode kebangsaan bersama. Proses ini ditandai oleh berbagai organisasi pergerakan kebangkitan bermunculan seperti. Boedi Uetomo, SI, Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia, Jamiatul khair dan lain-lain.¹⁷

¹⁶ Syahril Syarbaini, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa)*, (Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 68.

¹⁷ Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2014-2019, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2017), h. 27.

Kemerdekaan Indonesia merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan. Dari berbagai perjalanan serta perjuangan menuju cita-cita bangsa yang sangat penting untuk dimaknai secara mendalam adalah tentang Pidato Bung Karno tentang Lahirnya Pancasila dalam persidangan pertama BPUPKI, tanggal 1 juni 1945, menyebutkan istilah jembatan Emas.¹⁸ Pada dasarnya inti dari ucapan Bung Karno pada tanggal 1 juni adalah “negara semua buat semua”, bukan negara buat satu orang, bukan pula untuk satu golongan.

*“Baik saudara-saudara yang bernama kaum bangsawan yang di sini, maupun saudara-saudara yang dinamakan kaum Islam, semuanya telah mufakat kita hendak mendirikan suatu negara ‘semua buat semua’. Bukan buat satu orang baik golongan bangsawan, maupun golongan yang kaya, tetapi ‘semua buat semua’ ”.*¹⁹

Kemudian Bung Karno menjelaskan lebih lanjut tentang dasar-dasar negara yang bernama pancasila (lima dasar) dan di atas lima dasar itulah kita bangsa Indonesia mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.²⁰ Rumusan lima prinsip itu adalah:

- Kebangsaan Indonesia.
- Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan.
- Mufakat atau demokrasi.

¹⁸ Backy Krisnayuda, *Pancasila Dan Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016), h. 2.

¹⁹ *Op. Cit*, h. 30.

²⁰ *Op. Cit*, h. 3.

- Kesejahteraan sosial.
- Ketuhanan yang berkebudayaan.

Mengapa dasar negara yang menyatukan dan menjadi panduan keindonesiaan itu dibatasi lima? Jawaban Bung Karno adalah memang beliau menyukai simbolisme angka lima. Dalam antropologi masyarakat Indonesia. Bung Karno menyebutkan, “Rukun Islam lima jumlahnya. Pandawa pun lima bilangannya.” Hal lain juga bisa ditambahkan, bahwa dalam tradisi Jawa ada lima larangan sebagai kode etika, yang disebut istilah “*Mo-limo*”.²¹

Rumusan Bung Karno tentang pancasila kemudian digodok melalui Panitia Delapan yang dibentuk oleh Ketua Sidang BPUPKI. Kemudian membentuk “Panitia Sembilan” yang menyempurnakan rumusan pancasila dari Pidato Bung Karno ke dalam rumusan versi Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Fase pengesahan dilakukan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang menghasilkan rumusan final pancasila yang mengikat secara konstitusional dalam kehidupan bernegara.²²

Rumusan lima nilai dasar sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah:

²¹ *Op. Cit*, h. 32.

²² *Ibid*, h. 28.

- 1). Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2). Kemanusiaan yang adil dan beradab.
- 3). Persatuan Indonesia.
- 4). Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
- 5). Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan dasar negara Republik Indonesia.²³

c. Pancasila Sebagai Dasar Negara

Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, sering juga pengertian ini disebut sebagai dasar falsafah (filsafat) negara, ideologi negara. Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau digunakan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila sebagai dasar negara ini memang sesuai dengan sejarah kelahirannya yang dipersiapkan sebagai dasar negara. Hal ini bisa kita lihat dalam persidangan BPUPKI. Secara tegas dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kalimat:

“maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada: Ketuhanan Yang Maha Esa”²⁴

²³ *Ibid*, h. 44.

²⁴ *Loc. Cit.*, h. 10.

Menurut Notonagoro, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia (merupakan pokok kaidah negara yang fundamental). Ini berarti bahwa garis-garis kebijaksanaan politik dalam maupun luar negeri harus dijiwai dan berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu fungsi sebagai dasar negara adalah merupakan fungsi pokok. Penjabaran fungsi pokok pancasila sebagai dasar negara ini dituangkan dalam Undang-Undang yang merupakan tafsir resmi dari pancasila sebagai dasar negara.²⁵ Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber hukum (sumber tertib hukum) Indonesia.

C. Bhineka Tunggal Ika

Bhineka Tunggal Ika sebagaimana yang ketahui. Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan, moto atau perkataan. Untuk definisi bhineka tunggal ika sendiri dapat kita temukan dalam kitab karangan Mpu Tantular. Dalam kitab tersebut Mpu Tantular menulis “*Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa, Bhineka rakwa ring apan kena parwanosen, mangka ng jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal, Bhineka tunggal ika tan hana dharma mangrwa*” (Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran *Jina* (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah tetapi satu jua, artinya tak ada *dharma* yang mendua).²⁶

²⁵ *Ibid*, h. 10.

²⁶ *Op. Cit*, h. 181.

Bhineka Tunggal Ika adalah semboyan yang dijadikan modal untuk bersatu. Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan, kekuatan, yang sekaligus menjadi tantangan bagi bangsa Indonesia. Oleh karena itu kemajemukan bangsa harus dihargai, dijunjung tinggi dan dihormati dalam pengimplementasian kehidupan berbangsa dan bernegara.²⁷

Dalam arti ke Indonesiaan bahwa Bhineka Tunggal Ika yang lebih signifikan yang kita kenal adalah “*berbeda-beda tapi satu*”. Dapat penulis simpulkan bahwa nilai yang terdapat pada pilar Bhineka Tunggal Ika adalah nilai persatuan, toleransi. Pengertian toleransi itu sendiri adalah sikap saling menghormati dan saling menghargai baik kelompok maupun individu, dalam masyarakat maupun negara dengan tujuan menghindari sikap diskriminasi hanya karena adanya perbedaan suku, ras, budaya, bahasa, dan agama.

D. NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Negara kesatuan republik Indonesia adalah negara yang berbentuk republik. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik dan kedaulatan berada di tangan rakyat.²⁸ Yang dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai

²⁷ *Loc. Cit.*, h. 8.

²⁸ Padmo Wahjono, *Negara Republik Indonesia*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 126.

pemerintahan daerah, yang diatur undang-undang.²⁹ Kalimat “dibagi atas” menunjukan bahwa negara kesatuan republik Indonesia tersebut adalah satu.

Meskipun negara kesatuan republik Indonesia sudah dibagi-bagi ke dalam beberapa bagian-bagian, namun dia tetap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Walaupun di dalam kota atau kabupaten memiliki pemerintahan sendiri yakni pemerintahan daerah namun tetap dalam bingkai NKRI (negara kesatuan republik Indonesia).³⁰

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bahwa bangsa dan negara Indonesia terdiri atas berbagai macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu pedoman bangsa atau negara Indonesia adalah berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kesatuan sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945.³¹

Negara kesatuan bukan dimaksudkan merupakan suatu kesatuan dari negara bagian (federasi) melainkan kesatuan dalam arti keseluruhan unsur-unsur negara yang bersifat fundamental.³² Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkedaulatan rakyat. Ditegaskan kembali bahwa “*Negara Indonesia adalah negara persatuan yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia*”.³³

²⁹ Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, Edisi Revisi, 2017), h. 65.

³⁰ *Op. Cit*, h. 175.

³¹ *Ibid*, h. 143.

³² *Ibid*, h. 142.

³³ *Ibid*, h. 143.

BAB IV

NILAI-NILAI FUNDAMENTAL EMPAT PILAR KEBANGSAAN DAN FILSAFAT POLITIK ISLAM

A. Nilai-nilai Fundamental Empat Pilar Kebangsaan

Empat pilar kebangsaan yang disosialisasikan oleh MPR RI, yaitu Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara republik Indonesia serta ketetapan MPR, NKRI sebagai bentuk negara dan Bhineka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.¹

Empat pilar ini bagi bangsa Indonesia adalah sebagai konsepsi logis, untuk menjadikan bangsa yang kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Bagi setiap penyelenggara serta segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral keindonesiaan yang membawa kepada tercapainya kehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.² Adapun nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan adalah sebagai berikut:

1. Nilai Ketuhanan.

Di dalam sila pertama mengandung nilai ketuhanan (religious) yakni kepercayaan terhadap adanya Tuhan Yang Maha Esa, sebagai

¹ Sambutan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Periode 2014-2019, h. xxiii.

² Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2014-2019, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 20170, h. 8.

pencipta segala sesuatu dengan sifat-sifat yang sempurna dan suci.³ Dengan demikian Tuhan maha sempurna dalam sifatnya, sempurna dalam zatnya, (kekal, tunggal) dan tidak sama dengan ciptaannya, adanya mutlak harus “ada”. Jadi ketuhanan mengandung arti ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai dasar, asas kenegaraan.⁴

Keyakinan adanya Tuhan Yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar dan dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Atas keyakinan yang demikianlah, maka negara Indonesia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁵ Oleh karena itu negara memberikan jaminan untuk setiap orang dapat menyembah Tuhan-nya sesuai dengan keyakinannya masing-masing.

Meskipun negara telah memberikan kebebasan untuk setiap pemeluk agama, dan dalam implementasi pengamalan agamanya tentu harus dengan cara yang baik atau yang berkeadaban yaitu untuk saling hormat menghormati satu sama lain.⁶ Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi di antara hak-hak asasi manusia, karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia

³ *Op. Cit.*, h. 88.

⁴ *Op. Cit.*, h. 97.

⁵ Syahrial Syarbaini, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) Di Perguruan Tinggi*, (Ciawi-Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), h. 39.

⁶ *Loc. Cit.*, h. 45.

sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Kebebasan beragama bukanlah pemberian negara atau golongan, melainkan didasarkan kepada manusia itu sendiri tanpa ada paksaan dari luar dirinya.⁷ Yang dijelaskan oleh undang-undang dasar 1945 adalah sekedar bentuk komitmen untuk kesejahteraan rakyat semata, agar bisa hidup berdampingan. Seperti yang dijelaskan oleh UUD 1945 pasal 29 berikut ini:

*“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk berhak untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk peribadatan menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.*⁸

Atas dasar itulah setiap warga negara Indonesia untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan menurut agama dan keyakinannya masing-masing.⁹ Sehingga nilai ketuhanan menjadi basis dari nilai kemanusiaan, persatuan Indonesia, kerakyatan dan keadilan sosial.¹⁰ Atau menjiwai dan mencari serta membimbing perwujudan kemanusiaan yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk negara kesatuan Indonesia yang telah berdaulat dalam permusyawaratan/perwakilan guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹¹

⁷ *Loc. Cit.*, h. 97.

⁸ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, 2017), h. 183.

⁹ *Op. Cit.*, h. 47.

¹⁰ *Loc. Cit.*, h. 93.

¹¹ *Op. Cit.*, h. 40.

Seperti yang ditegaskan oleh Moh. Hatta, bahwa Sila '*Ketuhanan Yang Maha Esa*' merupakan dasar yang memimpin cita-cita kenegaraan kita untuk menyelenggarakan yang baik bagi masyarakat, dan penyelenggaraan negara. Dengan dasar sila ketuhanan yang maha esa ini, maka politik negara mendapat dasar moral yang kuat, sila ini yang akan memimpin kearah jalan kebenaran, keadilan, kebaiaikan, kejujuran dan persaudaraan.¹²

2. Nilai Kemanusiaan.

Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk yang berbudaya dengan memiliki potensi pikir, rasa, karsa dan cipta. Karena potensi yang dimilikinya itu manusia tinggi martabatnya.¹³ Adil mengandung arti bahwa segala sesuatu keputusan, tindakan harus didasarkan kepada norma-norma yang obyektif tidak subyektif, dan tidak sewenang-wenang.

Sedangkan makna beradab berarti berbudaya, atau sikap hidup, atau tindakan yang selalu berdasarkan nilai-nilai budaya, terutama norma kesusilaan, kesopanan, norma sosial, norma moral, keagamaan dalam hal ini etika/akhlak.¹⁴ Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab ialah kesadaran sikap dan perebuatan yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia

¹² Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, (Yogyakarta, Paradigma Offset, 1999), h. 86.

¹³ *Op. Cit.*, h. 40.

¹⁴ *Op. Cit.*, h. 99.

dalam hal ini berhubungan dengan norma kesusilaan. Baik terhadap diri sendiri, sesama manusia maupun terhadap lingkungan (*biotik dan abiotik*). Mereka harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan fitrahnya, sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa.¹⁵

Sila kedua ini diliputi dan dijiwai oleh sila pertama, hal ini berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab adalah bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. Manusia adalah makhluk individual dan universal sekaligus sebagai makhluk Tuhan.¹⁶ Hakikat pengertian di atas sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alenia pertama, sebagai berikut:

“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan....”

Pengejawantahan sila kedua ini mengandung nilai-nilai seperti pemeliharaan, perlindungan yang berkaitan dengan agama, perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan individu, keluarga dan martabatnya serta hartanya. Dan setiap orang berhak memperoleh jaminan atau perlindungan hak milik pribadi.¹⁷ Pada intinya jika kita mau mengambil

¹⁵ *Op. Cit.*, h. 40.

¹⁶ *Op. Cit.*, h. 53.

¹⁷ *Ibid*, h. 54.

inti dari praktik atau kebiasaan Islam, maka kita akan mengerti bagaimana memanusiakan manusia seutuhnya.

Sebagai contoh, dalam kehidupan umat Islam, setiap muslim yang datang ke masjid untuk melaksanakan shalat berjamaah, ia berhak untuk berdiri atau mengisi barisan terdepan yang masih lowong, tanpa membedakan asal usul keturunan, ras, pangkat, jabatan atau kedudukan dan sebagainya.

Karena memang semua manusia itu pada hakikatnya sama di hadapan Allah SWT. Menurut Allah yang termulia di hadapannya adalah yang paling bertakwa kepadanya.¹⁸

3. Nilai Persatuan.

Kata satu berarti utuh, tidak terpecah belah, tidak dapat dibagi. Persatuan mengandung pengertian bersatunya bermacam corak yang bereneka ragam menjadi satu kesatuan.¹⁹ Persatuan Indonesia dalam sila ketiga ini, mencakup persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan.

Persatuan Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia yang bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas, dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia adalah faktor yang bertujuan untuk

¹⁸ *Op. Cit.*, h. 195.

¹⁹ *Ibid*, h. 100.

melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk kemajuan dan kesejahteraan serta kecerdasan bangsa, dan mewujudkan perdamaian dunia yang abadi dan berkeadilan sosial. Hal ini sesuai dengan alenia keempat pembukaan UUD Dasar 1945 yang berbunyi, *“kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”*.

Persatuan Indonesia adalah sebagai perwujudan paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh sila pertama dan kedua. Ketuhanan Yang Maha Esa, serta kemanusiaan yang adil beradab.²⁰ Mempunyai arti dan jangkauan lingkungan yang seluas-luasnya, meliputi seluruh manusia pada umumnya, maka sila persatuan Indonesia arah jangkawannya hanya meliputi lingkungan hidup bangsa Indonesia, di dalam masyarakat dan negara Indonesia. Oleh karena itu sila ketiga ini menimbulkan faham kebangsaan, akan tetapi bukan kebangsaan yang sempit (*chauvinistis*), sebab dijiwai, dan dilandasi oleh Ketuhanan dan kemanusiaan. Dengan demikian faham kebangsaan Indonesia yang didasarkan pada Pancasila, adalah faham kebangsaan yang mengakui dan menghargai bangsa lain dalam percaturan pergaulan dunia.²¹

²⁰ *Op. Cit.*, h. 41.

²¹ *Op. Cit.*, h. 101.

Oleh karena itu rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia perlu pembinaan secara terus menerus, agar keanekaragaman yang kompleks ini tidak menjadi halangan bagi masyarakat untuk tetap bersatu teguh, sebagaimana yang dikuatkan sendiri oleh motto atau lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila dengan “Bhineka Tunggal Ika”.

Semboyan Bhineka Tunggal Ika nampaknya sudah tidak asing lagi ditelinga bangsa Indonesia. Semboyan ini secara sederhana dapat diartikan “bersatu dalam perbedaan dan berbeda dalam persatuan”, artinya bahwa bangsa Indonesia yang memiliki berbagai macam agama, suku, ras, budaya, dan bahasa, tidaklah menyebabkan untuk terjadinya pertentangan apalagi peperangan. Seharusnya pun sebaliknya walaupun bangsa Indonesia berada dalam perbedaan dan keberagaman, ini tidak menjadi suatu halangan bagi bangsa Indonesia untuk setia, bersatu dalam rangka mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²²

Implementasi konsep Bhineka Tunggal Ika merupakan implementasi dari sila ketiga yakni persatuan Indonesia. Oleh karena itu harus benar-benar dilaksanakan secara bertanggung jawab, sehingga mampu menimbulkan kesadaran bahwasanya keanekaragaman harus direspons secara positif, dan tidak menjadikan bangsa Indonesia menjadi

²² Idrus Ruslan, *Negara Madani Aktualisasi Nila-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, (Yogyakarta, Suka Press, 2015), h. 243.

terpecah belah. Karena pada hakikatnya keberagaman itu merupakan kehendak Tuhan (*sunatullah*).

Dalam konteks ini menurut Hardono Hadi yang dikutip oleh Idrus Ruslan, dia berpendapat bahwa, jika Bhineka Tunggal Ika menjadi semboyan perjuangan bangsa Indonesia, maka hal itu sekaligus menjadi batu penguji manusia Indonesia, sejauh mana dia menghayati sila pertama, kedua, dan ketiga.²³ Nilai persatuan pada hakikatnya adalah universal dan melampaui paham atau ikatan-ikatan golongan, suku bangsa, ras dan sebagainya yang bersifat sektarialistik maupun primordialistik.²⁴

Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini, serta Bhineka Tunggal Ika sebagai lambang persatuan bangsa Indonesia, ini merupakan perwujudan yang esensial untuk menumbuhkan rasa kepedulian terhadap orang lain dalam bentuk toleransi (sikap menghargai dan membenarkan perbedaan). Dengan harapan demi kesejahteraan, keutuhan, serta menjaga segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

4. Nilai Kerakyatan Permusyawaratan/Perwakilan (Demokrasi).

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yang dipergunakan untuk menyebut semua orang yang menjadi warga dari satu negara tertentu.

Dalam ilmu kenegaraan, rakyat merupakan unsur konstitutif, unsur

²³ *Ibid*, h. 244.

²⁴ *Ibid*, h. 242.

pembentuk dari negara. Jadi tanpa rakyat tidak akan ada negara. Karena rakyat sebagai pembentuknya, maka rakyat merupakan subyek penentu terbentuknya negara dan kehidupan negara. Oleh karena itu “kerakyatan” di sini diartikan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam negara berada ditangan rakyat. Faham ini disebut faham kedaulatan rakyat atau demokrasi.²⁵ Berarti bangsa Indonesia menganut faham demokrasi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Demokrasi secara tidak langsung (perwakilan) sangat penting dalam wilayah negara yang luas serta penduduk yang banyak. Pelaksanaan demokrasi langsung adalah dalam rangka memilih kepala negara atau sistem referendum. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, berarti kekuasaan tertinggi ada ditangan rakyat. Hikmat kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab serta didorong dengan i'tikad baik sesuai dengan hati nurani.

Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian bangsa Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, sehingga tercapai keputusan yang berdasarkan kebulatan

²⁵ *Ibid*, h. 101.

pendapat, dari hasil mufakat tersebut.²⁶ Kata demokrasi dalam pancasila memang tidak disebutkan dengan jelas, tetapi yang digunakan adalah istilah kerakyatan.²⁷ Nampak sama dengan nilai yang terkandung dalam NKRI, bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Sila keempat ini menjadi landasan, asas dalam sistem pemerintahan demokrasi di Indonesia. Sistem demokrasi yang dikembangkan adalah demokrasi pancasila, yang berarti harus dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yang lain.

Dengan demikian harus selalu disertai dengan rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut keyakinan agama masing-masing, haruslah menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat manusia, dan harus menjamin serta mengkokohkan persatuan bangsa, dan harus dimanfaatkan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.²⁸

5. Nilai Keadilan Sosial.

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti keseluruhan orang Indonesia, baik yang berada di wilayah republik maupun warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Dari pengertian tersebut, maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat

²⁶ *Op. Cit.*, h. 42.

²⁷ Sunoto, *Filsafat Sosial Dan Politik Pancasila*, (Yogyakarta, Andi Offset, 1985), h. 73.

²⁸ *Op. Cit.*, h. 102.

Indonesia berarti, setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan perlakuan yang adil dalam semua segi kehidupan baik dalam bidang sosial, ekonomi, politik, hukum dan kebudayaan. Jadi keadilan sosial tidak hanya dalam bidang materiil saja, melainkan mencakup di dalamnya dalam bidang moral dan spiritual.

Sehingga dalam mewujudkan keadilan sosial, harus dijiwai dan dilandasi oleh sila-sila yang lain. Keadilan sosial yang menjadi tujuan bangsa Indonesia adalah masyarakat adil makmur berdasarkan Pancasila di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁹ Sila keadilan sosial ini memang perwujudannya yang paling konkrit dari prinsip-prinsip Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dengan menggunakan kata kerja “mewujudkan” suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.³⁰ Namun cara-cara yang ditempuh untuk mewujudkannya harus dilandasi oleh nilai-nilai moral etik dan berdasarkan Pancasila, tidak menghalalkan segala cara.

Prinsip keadilan adalah inti dari moral ketuhanan, perikemanusiaan, persatuan dan kedaulatan rakyat. Di satu sisi perwujudan keadilan sosial itu harus mencerminkan perintah etis dari keempat sila lainnya. Menurut Notonagoro sila kelima: keadilan sosial

²⁹ *Ibid*, h. 103.

³⁰ *Loc. Cit.*, h. 79.

bagi seluruh rakyat Indonesia diliputi dan dijiwai oleh sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.³¹

Dapat penulis simpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan ini adalah sebagai berikut. *Pertama* nilai Ketuhanan, *kedua* nilai kemanusiaan, *ketiga* nilai persatuan (toleransi), *keempat* musyawarah (demokrasi), kerakyatan, *kelima* keadilan sosial.

B. Nilai-nilai Fundamental Empat Pilar Kebangsaan dalam Perspektif Filsafat Politik Islam

1. Nilai ketuhanan

Sebelum penulis membahas lebih jauh penulis ingin sedikit membahas bagaimana pentingnya nilai-nilai ketuhanan dalam politik atau dalam sebuah negara. Pada abad pertengahan di Eropa yang ditandai oleh dominasi agama Kristen dalam kehidupan bernegara. Pada masa itu muncul negara teokrasi mutlak dari Agustinus. Bahwasanya ia berpendapat, negara di bumi seperti layaknya negara iblis yang hanya akan memberikan kesengsaraan bagi manusia. Untuk itu, ia mendambakan negara yang mempunyai nilai-nilai ketuhanan yang bisa mendatangkan kedamaian dan ketentraman.³²

³¹ *Ibid*, h. 81.

³² Ayi Sofyan, *Etika Politik Islam*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2012), h. 77.

Nilai ketuhanan dalam perspektif filsafat politik Islam secara umum dipahami sebagai nilai yang menjiwai seluruh unsur lainnya yang berada di alam semesta ini. Secara khusus dalam hal bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam hal bermasyarakat, berbangsa dan bernegara nilai ketuhanan ini harus diberikan posisi yang setinggi-tingginya sebagai sumber peraturan dan kebijakan-kebijakan dalam negara.

Dengan lain kata dalam perspektif filsafat politik Islam nilai ketuhanan ini sangat menentukan dan memang sangat urgen. Bahkan dapat dipastikan hanya berdasarkan nilai ketuhanan tersebut seluruh kreativitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat berjalan sesuai dengan hakikat dan tujuan kehidupan kemanusiaan. Sehingga dalam pandangan filsafat politik Islam sumber politik tertinggi bagi manusia adalah nilai ketuhanan.³³

Secara historis Sistem politik yang dibangun oleh nabi Muhammad ketika di Makkah adalah sistem politik yang mengandung nilai-nilai ketuhanan yang sangat kokoh dan mengakar dalam seluruh tatanan kehidupan umat manusia, sehingga formulasi politik adalah keniscayaan untuk kepentingan kehidupan material, spiritual dan moral umat manusia.

³³ Himyari Yusuf, *Dasar-Dasar Aksiologi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Filsafat Politik Islam*, (Bandar Lampung, An-Nuur Press, 2013), h. 160.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa esensi orientasi politik nabi Muhammad SAW adalah untuk meluruskan dasar-dasar fundamental politik agar koheren dengan hakikat dan fitrah kemanusiaan. Artinya secara reflektif politik nabi Muhammad pada periode Makkah memiliki dasar ontologis, dan aksiologis dari dan untuk kemanusiaan yang bersifat totalitas. Seperti membebaskan manusia dari perbudakan hawa nafsu, ber-Tuhan pada benda atau materi, sifat keserakahan, ketidak adilan, kecurangan, kesewenang-wenangan dan moralitas yang destruktif.

Seperti yang ditegaskan oleh Inu kencana yang dikutip oleh Himyari Yusuf, bahwa pada kenyatannya Muhammad selain beliau sebagai Rasul Allah, Muhammad juga sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.³⁴ Namun pada waktu nabi di Makkah, beliau belum dapat membentuk suatu masyarakat yang kuat lagi berdiri sendiri. Umat Islam di waktu itu baru dalam kedudukan lemah, tidak sanggup menentang kekuasaan yang dipegang kaum pedagang Quraisy yang ada di Makkah. Akhirnya nabi bersama sahabat dan umat Islam lainnya terpaksa meninggalkan kota Makkah dan pindah ke Yasrib, yang kemudian dikenal dengan nama Madinah (kota Nabi).

Di kota ini keadaan nabi dan umat Islam mengalami perubahan yang besar. Kalau di Makkah mereka sebelumnya merupakan umat yang

³⁴ Himyari Yusuf, *Pergumulan Pemikiran Politik Kontemporer Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global*, (Jurnal Tapis, Vol, 8 No. 2 Juli-Desember 2012), h. 112.

lemah dan tertindas, di Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik dan segera merupakan umat yang kuat dan dapat berdiri sendiri.³⁵ Relevan dengan uraian di atas bahwa secara filosofis fokus pertama dari politik pada zaman nabi adalah menegaskan dan memurnikan nilai-nilai ketuhanan atau ketauhidan, serta menempatkan Tuhan sebagai sesuatu yang wajib dimuliakan dan diagungkan.³⁶

Keimanan serta keyakinan kepada Tuhan memang merupakan sesuatu yang mutlak menjadi titik pangkal bagi seluruh kreativitas dan aktivitas kehidupan manusia, termasuk dalam urusan berbangsa dan bernegara. Penempatan Tuhan sebagai sumber atau menjadi sentral dalam berbagai aktivitas berbangsa dan bernegara, mengandung makna bahwa nilai ketuhanan tidak boleh tercerabut dari ranah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, nilai ketuhanan harus menjiwai seluruh kehidupan manusia dalam segala ruang dan waktu.³⁷

Secara fitrah manusia diciptakan Allah dengan watak yang cenderung untuk berkumpul dan bermasyarakat, dan apabila mereka berkelompok dan menetap di kota-kota dan hidup bersama, untuk menjamin kerukunan dan keselarasan hubungan antara mereka, Tuhan meletakkan peraturan-peraturan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat sebagai rujukan dan yang harus

³⁵ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, (Jakarta, UI-Press, 1985), h. 88.

³⁶ *Op. Cit.*, h. 160.

³⁷ *Ibid*, h. 161.

mereka patuhi.³⁸ Menurut Raghieb As-Sirjani yang dikutip oleh Himyari Yusuf, mengemukakan bahwa tidak ada suatu bangsa melainkan agama memiliki pengaruh terhadapnya dan menguasai relung jiwanya. Agama adalah fitrah yang dirasakan oleh setiap insan dalam relung jiwanya yang terdalam, karena setiap manusia pasti mempercayai, mengimani keberadaan Tuhan yang memberikan petunjuk dan membimbing kepada yang hak atau kebenaran.

Pandangan Raghieb As-Sirjani yang dikutip oleh Himyari Yusuf ini menunjukkan bahwa agama sangat mempengaruhi pada persoalan kehidupan manusia. Dan beliau pun mengatakan bahwa agama adalah fitrah yang dirasakan oleh setiap manusia. Ini adalah sebagai konsekuensi dari pengakuan dan kepercayaan akan adanya Tuhan.³⁹ Oleh sebab itu nampaknya tidak terlalu berlebihan jika filsafat politik Islam menempatkan nilai-nilai ketuhanan sebagai sentral dalam seluruh aktivitas kehidupan umat manusia di dunia pada umumnya, dan di Indonesia khususnya.

Pandangan filsafat politik Islam terhadap nilai ketuhanan selain merupakan sentral bagi seluruh kehidupan manusia, secara fungsional juga memiliki peran yang sangat penting dalam melahirkan suatu kesadaran bahwa segala sesuatu yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan di

³⁸ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta, UI Press, 2003), h. 45.

³⁹ *Op. Cit.*, h. 161.

hadapan Tuhan Ynag Maha Esa. Kesadaran ini akan bermuara pada sikap kerendahan hati dan keikhlasan dalam berpikir dan bertindak, serta melahirkan rasa kasih sayang terhadap sesama manusia, atau secara khusus dari penguasa atau pemerintah terhadap rakyatnya.

Bagi bangsa Indonesia nilai ketuhanan adalah keniscayaan, karena secara faktual historis masyarakat bangsa Indonesia terkenal dengan masyarakat yang taat beragama atau menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas dan spiritualitas. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan Roghib As-Sirjani sebelumnya, bahwa ketaatan beragama dan diperankan diberbagai persoalan kehidupan berbangsa tidak lain merupakan implikasi dari pengakuan dan keyakinan akan adanya Tuhan.⁴⁰ Ini relevan dengan masyarakat Indonesia yang terkenal sebagai masyarakat yang beragama. Adalah masyarakat yang bertuhan dan masyarakat yang menganut nilai-nilai ketuhanan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dipertegaskan lagi bahwa dalam perspektif filsafat politik Islam, sumber paling tertinggi bagi bangsa Indonesia adalah nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan harus diletakkan sebagai nilai tertinggi dan sentral, dan harus mengalir dan menjiwai seluruh kebijakan dan peraturan yang ditetapkan oleh penguasa atau pemerintah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

⁴⁰ *Ibid*, h. 162.

Dengan demikian semua komponen anak bangsa (rakyat) Indonesia haruslah betul-betul menyadari sepenuhnya, bahwa nilai ketuhanan yang terkandung dalam pancasila adalah nilai yang sangat strategis dan niscaya untuk dijadikan sebagai landasan dasar yang harus tercermin dalam setiap langkah kegiatan pembangunan bangsa.

Kesadaran semacam ini sangat penting agar hubungan antara rakyat dan penguasa negara, ataupun sebaliknya pemerintah dengan rakyatnya dapat terwujud dalam suatu keharmonisan. Perwujudan nilai ketuhanan dalam seluruh kebijakan, peraturan dan perundang-undangan selain sesuai dengan hakikat kemanusiaan, harus juga berimplikasi terhadap terbangunnya kekuasaan dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, serta kekuasaan yang berpihak kepada kepentingan rakyatnya.⁴¹ Jika kita melihat fakta sejarah inti politik periode nabi sampai ke periode Khulafa Ar-Rasyidin. Yang menjadi dasar fundamental sistem politik adalah nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan.

Serta yang memang menjadi sumber paling utama adalah al-Quran dan as-Sunnah nabi Muhammad SAW. Kemudian fokus orientasi politik adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan manusia, baik yang bersifat spiritual maupun yang bersifat material atau jasadiyah yang terbentuk secara seimbang dalam formulasi bangunan tauhidi.⁴²

⁴¹ *Ibid*, h. 163.

⁴² *Op. Cit.*, h. 116.

Pandangan ini secara interpretasi menunjukkan suatu relevansi, bahwa Tuhan adalah yang mutlak dan sumber dari seluruh yang ada di alam semesta. Ini artinya secara kausalitas Tuhan menjadi penyebab adanya segala sesuatu yang ada, baik ada dalam kenyataan, ada dalam ide, maupun ada dalam kemungkinan.

Oleh karena itu tidak ada *hujjah* lain kecuali Tuhan adalah sumber dari segala kehidupan alam semesta, dan Tuhan penyebab adanya manusia (rakyat), bangsa dan negara.⁴³ Maka dari itu nilai ketuhanan dalam pandangan filsafat politik Islam adalah harga mati untuk dijadikan dasar tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pengakuan terhadap nilai-nilai ketuhanan sebagai dasar dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah sebagai cerminan pertanggung jawaban manusia sebagai *khalifah* Tuhan di bumi. Pertanggung jawaban yang dimaksud adalah bahwa semua perbuatan dan tingkah laku manusia adalah kongkrit sebagai bentuk amal shaleh yang sesuai dengan nilai ketuhanan, sehingga menampilkan tatanan sosial kenegaraan yang adil dan damai.⁴⁴ Pengakuan akan prinsip nilai ketuhanan niscaya memunculkan nilai-nilai kebersamaan serta persamaan.

⁴³ *Op. Cit.*, h. 164.

⁴⁴ *Ibid*, h. 165.

Bahwasanya seluruh manusia pada hakikatnya harus dalam kebersamaan dan kesamaan karena manusia sejatinya adalah makhluk Tuhan.⁴⁵

2. Nila Persatuan dan Kesatuan

Kata persatuan dan kesatuan dalam filsafat meliputi kebersamaan dan kesamaan, karena tidak mungkin akan ada persatuan dan kesatuan apabila tidak ada kebersamaan dan kesamaan. Maka yang dimaksud nilai persatuan dan kesatuan juga mengandung nilai kebersamaan dan kesamaan. Nilai persatuan dan kesatuan atau nilai kebersamaan dan kesamaan dalam perspektif filsafat politik Islam merupakan nilai yang sangat penting dan juga nilai yang sangat menentukan.

Sebagaimana yang sudah dijelaskan dipembahasan sebelumnya, bahwa salah satu strategi politik nabi Muhammad adalah membangun kebersamaan umat dan memandang manusia adalah sama. Kebersamaan dan kesamaan adalah sesuatu yang mutlak dalam pembangunan masyarakat, bangsa dan negara. Bahkan keberhasilan suatu bangsa atau negara dalam mencapai tujuannya.⁴⁶ Adalah ditentukan oleh sejauhmana kemampuan penguasa atau pemerintah yang berkuasa mewujudkan kebersamaan dan kesamaan itu sendiri.

Nilai persatuan kesatuan atau nilai kebersamaan dan kesamaan dalam perspektif filsafat politik Islam adalah suatu yang kodrat bagi

⁴⁵ *Ibid*, h. 166.

⁴⁶ *Ibid*, h. 166.

kehidupan manusia. Oleh karena itu keharusan nilai-nilai tersebut dalam mewujudkan masyarakat, bangsa dan negara yang menyeluruh dan universal juga harus dipandang sebagai sesuatu yang kodrati. Nilai persatuan dan kesatuan atau nilai kebersamaan dan kesamaan dikatakan sebagai kodrat manusia, karena manusia sebagai makhluk individual sekaligus makhluk sosial yang secara kodrati tidak mungkin bisa hidup dalam kesendirian, melainkan harus dengan kebersamaan dan kesamaan.⁴⁷ Seperti yang dijelaskan oleh AL-Farabi yang dikutip oleh Ali Abdul Mu'ti Muhammad ia menjelaskan.

Manusia tidak mungkin memenuhi kebutuhannya sendirian tanpa bantuan orang lain. Sesungguhnya fitrah setiap manusia terkait dengan orang lain. Setiap manusia berada dalam kondisi seperti ini. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kesempurnaannya, manusia butuh bertetangga dengan sesamanya dan butuh bermasyarakat. Demikian pula, fitrah makhluk ini adalah berlingkungan dan damai berdampingan dengan spesiesnya. Oleh karena itu, makhluk yang bernama manusia ini disebut pula makhluk sosial.

Fitrah inilah yang mendorongnya mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Secara pasti, kecenderungan untuk bersosialisasi ini pada gilirannya membentuk kumpulan manusia atau masyarakat yang

⁴⁷ *Ibid*, h. 167.

berbeda-beda.⁴⁸ Dalam hal ini Indonesia, negara Indonesia dikenal dengan negara pluralistik atau beragam, adat, budaya, bahasa, suku, ras dan agama.

Untuk mempersatukan perbedaan tersebut Indonesia sudah mempunyai semboyan kebangsaan yang di rumuskan oleh pendiri negara Indonesia. Yaitu Bhineka Tunggal Ika (berbeda-beda tetapi satu jua). Behineka tunggal ika oleh pendiri bangsa Indonesia diberikan penafsiran baru karena dinilai relevan dengan keperluan strategis bangsa Indonesia. Seperti penulis bahas di atas bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang beragam, terdapat banyak suku, agama, ras, budaya, adat dan bahasa, walaupun begitu tetap satu kesatuan sebangsa dan setanah air.⁴⁹

Keberagaman bangsa Indonesia ini dianggap penting oleh para leluhur, dijadikan sebagai modal untuk membangun bangsa ini menjadi bangsa yang besar. Menurut sejarah bahwa seluruh anak bangsa yang berasal dari berbagai suku semua terlibat dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, semua ikut berjuang dengan mengambil peran masing-masing.⁵⁰ Di sinilah lahir sumpah pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, juga mengikrarkan untuk bersatu padu mendirikan negara kesatuan republik Indonesia, serta cita-cita membangun sebuah bangsa

⁴⁸ *Loc. Cit.*, h. 354.

⁴⁹ Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, (Jakarta, Sekretariat Jendral MPR RI, Edisi Revisi, 2017), h. 66.

⁵⁰ *Loc. Cit.*, h. 187.

Indonesia yang bersatu serta mengungkapkan rasa persatuan dan kesatuan yang berasal dari keberagaman.⁵¹

Seperti yang sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya bahwa manusia sebagai makhluk individual dan makhluk sosial (kedua tunggalan), menimbulkan keharusan untuk memahami diri sendiri dan sosial masyarakat atau hidup bermasyarakat, untuk mewujudkan kebersamaan, saling hormat menghormati satu sama lain, baik sesama manusia, maupun terhadap alam lingkungannya.

Artinya nilai individual dan nilai sosial sangat erat kaitannya dengan aktivitas kehidupan lahir dan batin, material dan immaterial, moral dan spiritual yang harus dilakukan sesuai daya-daya yang dimiliki manusia. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nilai persatuan dan kesatuan atau kebersamaan dan kesamaan dalam pandangan filsafat politik Islam merupakan keharusan yang bersifat fundamental bagi penyelenggaraan kekuasaan dalam pemerintahan negara.

Nilai kesatuan dan persatuan atau kebersamaan dan kesamaan dalam filsafat politik Islam tidak hanya berlaku bagi manusia seagama, satu etnis, satu kebudayaan saja, tetapi untuk seluruh umat manusia, tidak peduli dari agama, dan etnis mana, semua didudukkan sama dan setara. Kebutuhan nilai seperti ini secara historis pernah dilakukan oleh nabi Muhammad SAW. Pada masa nabi memerlakukan umat Islam, Yahudi

⁵¹ *Op. Cit.*, h. 67.

serta umat-umat lainnya.⁵² Sama atau setara, dengan demikian dalam filsafat politik Islam, pemberlakuan kesamaan dan kesetaraan semacam itu, selain memang merupakan wujud dari perintah agama, juga untuk mewujudkan kedamaian umat manusia, sekaligus sebagai upaya mengayomi semua umat manusia secara keseluruhan.

Menurut Masdar Farid yang dikutip oleh Himyari Yusuf bahwa persatuan menggambarkan konsep menyatunya unsur-unsur yang berbeda, dalam satu derap langkah bersama karena memiliki serta keinginan untuk mencapai cita-cita bersama. Langkah-langkah ini juga pertama kali dirintis oleh rasulullah SAW pada periode madinah. Pemerintahan Rasulullah di Madinah dibangun di atas landasan penghargaan terhadap kepluralan atau kebhinnekaan agama, budaya, tradisi, suku dan sebagainya.⁵³

Pada pemerintahan nabi di Madinah, nabi sendiri bukan hanya menjamin kebebasan memeluk dan mengamalkan agama, melainkan juga hak-hak politik bagi seluruh warga, termasuk non-Muslim, seperti dalam mempertahankan kota dari serangan musuh dari luar. Meski pernah terjadi peminggiran terhadap non-Muslim pada masa dinasti Umayyah selain periode Umar bin Abdul Aziz (717-720), tetapi sejak masa dinasti Abbasyiah (750-1258) justru umat non-Muslim diberikan kepemimpinan publik. Banyak dari keluarga Barmakiyah yang berasal dari sebuah

⁵² *Loc. Cit.*, h. 169.

⁵³ *Ibid*, h. 170.

keluarga Budha di Balkh Persia yang menjadi jendral dan gubernur.⁵⁴ Prinsip ini tertuang dengan gamlang dalam naskah konstitusi negara Madinah yang dikenal dengan “Piagam Madinah”.

Di dalam Piagam Madinah terdapat kalimat-kalimat yang mengandung persatuan dan kesatuan. Seperti Pada Pasal 1 dinyatakan “mereka satu umat, berbeda dari yang lain.” Pasal 15 menyebutkan “perlindungan Allah adalah satu.” Pasal 16 menentukan “orang Yahudi yang mengikuti kita, berhak atas pertolongan dan bantuan.” Pasal 24 menyatakan “kaum Yahudi memikul biaya bersama kaum mukminin selama dalam peperangan.” Pasal 25 menyebutkan “Yahudi Bani ‘Awf satu umat bersama kaum mukminin.”⁵⁵

Dari berbagai uraian di atas tentang nilai persatuan dan kesatuan atau nilai kebersamaan dan kesamaan, dapat di simpulkan bahwa nilai persatuan dan kesatuan yang meliputi kebersamaan dan kesamaan dalam perspektif filsafat politik Islam merupakan nilai yang dijiwai oleh nilai ketuhanan, dan menjiwai aktivitas kehidupan manusia, baik dalam kehidupan masyarakat, maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Urgensitas nilai tersebut karena selain merupakan kodrat manusia, juga merupakan perintah agama, serta sekaligus sebagai

⁵⁴ Sukron Kamil, *Pemikiran Politik Islam Tematik Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, (Jakarta, PT Kharisma Putra Utama, 2013), h. 227.

⁵⁵ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, (Jakarta, UI-Press, 1995), h. 99.

perbuatan amal shaleh, khususnya dalam menciptakan kedamaian, kenyamanan, keamanan, kesejahteraan lahir dan batin terhadap rakyat sebagai warganegara.

Nilai persatuan dan kesatuan atau nilai kebersamaan dan kesamaan dalam pespektif filsafat politik Islam harus dikritisasikan dalam kehidupan manusia, wabil khusus dalam tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bahkan seperti yang telah dikemukakan bahwa keharusan konkritisasi dimaksud bukan hanya terhadap internal rakyat Indonesia saja, namun untuk seluruh umat manusia yang ada diseluruh dunia terlepas dari bangsa dan negara mana, suku dan agama apa, dan seterusnya.⁵⁶ Dengan tekad persatuan itu pula akan terwujud suatu masyarakat yang toleran, saling menghargai dan menghormati terhadap kebhinekaan.⁵⁷ Bersatu kita teguh bercerai kita berai.

3. Nilai Kemanusiaan

Sebenarnya, prinsip-prinsip mendasar telah sangat diperlukan seperti perlunya persatuan manusia dan usaha manusia untuk mewujudkan kemaslahatannya juga menolak kemudharatan, seperti keadilan, kebebasan, musyawarah, dan persamaan hak, bukanlah kreasi-kreasi Islam, namun semua itu telah ada di setiap syariat dan telah dikenal sejak lama, juga di antara hal-hal yang ditunjukkan oleh akal sehat dan fitrah

⁵⁶ *Op. Cit.*, h. 170-171.

⁵⁷ *Loc. Cit.*, h. 247.

yang lurus.⁵⁸ Syariat Islam berbeda dengan yang lainnya dalam menetapkan persamaan hak secara mutlak yang tidak diputuskan kecuali sesuai dengan keadilan.

Maka tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak adalah persamaan yang sempurna antara individu rakyat. Rasulullah SAW bersabda: *Darah-darah orang mukmin seluruhnya sama, dan mereka berkuasa atas orang-orang selain mereka dan harus membantu dengan adanya jaminan mereka itu akan orang-orang lemah dari mereka. Ketahuilah, seorang muslim tidak diqishash dengan sebab membunuh seorang kafir, dan tidak boleh dibunuh orang kafir yang mempunyai perjanjian selama dalam masa perjanjiannya itu.* (HR. Ahmad, Abu Daud).

Rasulullah SAW, memutuskan bahwa darah-darah kaum muslimin itu sama, artinya setara dan tidak berbeda. Ini adalah persamaan yang sempurna antara semua kelompok dan persamaan sempurna antara semua umat dan jenis, juga persamaan sempurna antara penguasa dan rakyat biasa, persamaan antara nonmuslim dan muslim dalam negara Islam pada hak dan kewajiban, dan mereka masing-masing mempunyai agama dan

⁵⁸ Farid Abdul Khalik, *Fikih Politik Islam*, Penerjemah Faturrahman A. Hamid, (Jakarta, Sinar Grafika Offset, 2005), h. 225.

jalan sendiri-sendiri. Begitu juga persamaan antara laki-laki dan perempuan. Kecuali yang digariskan oleh *nash* al-Quran.⁵⁹

Kata kunci dalam nilai kemanusiaan ini adalah bagaimana dalam kontek pemerintahan yang baik, kebijakan dan putusan penguasa merupakan wujud untuk memanusiakan manusia. Sejatinya kata atau istilah memanusiakan manusia cukup sederhana untuk sekedar diucapkan, namun untuk realisasi secara mendasar itu sangat sulit dilakukan.

Memanusiakan manusia hanya dapat dilakukan secara kongkrit apabila dijiwai oleh nilai persatuan dan kesatuan atau nilai kebersamaan dan kesamaan sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Artinya memanusiakan manusia harus berawal dari nilai persatuan dan kesatuan, kebersamaan dan kesamaan, sehingga ada kesetaraan pandang terhadap seluruh umat manusia di seluruh dunia khususnya di negara Indonesia.

Seperti pendapatnya Kaelan yang dikutip oleh Himyari Yusuf mengemukakan, bahwa kemanusiaan itu adalah kesesuaian dengan hakikat manusia. Adapun unsur-unsur hakikat manusia adalah susunan kodrat yang terdiri atas raga yang terdiri atas unsur benda mati, unsur binatang dan unsur tumbuhan, kemudian jiwa terdiri dari unsur akal, rasa dan kehendak.

Sedangkan sifat-sifat kodrati manusia terdiri dari makhluk individual dan makhluk sosial. Dan hakikat manusia terdiri dari dua unsur,

⁵⁹ *Ibid*, h. 231-232.

yaitu unsur materi serta unsur immateri.⁶⁰ Sedangkan menurut Jalaluddin dan Abdullah yang dikutip oleh Himyari Yusuf menjelaskan bahwa dalam Islam secara tegas mengatakan hakikat manusia berkaitan dengan jasad dan ruh. Menurut pandangan Islam manusia terdiri dari dua substansi yaitu materi dari bumi serta ruh yang berasal dari Tuhan.

Berbagai penjelasan serta pandangan tersebut secara esensial telah menggambarkan bahwa hakikat nilai-nilai kemanusiaan. Secara fungsional nilai-nilai kemanusiaan adalah untuk menentukan garis pemisah perilaku manusia supaya tidak bersimpangan dengan tujuan hidup manusia, dan juga supaya tetap berperilaku positif yang sesuai dengan paham kedua tunggalan (materi dan immateri).⁶¹

Hakikat dan fungsi nilai kemanusiaan tersebut di atas, menggambarkan bahwa nilai tersebut secara hakiki diturunkan dari nilai ketuhanan. Oleh karena itu nilai kemanusiaan merupakan perpaduan antara susunan dari material dan spiritual, manusia pribadi dan Tuhan, sehingga nilai kemanusiaan adalah nilai yang bersifat multi-dimensional.

Nilai kemanusiaan dalam perspektif filsafat politik Islam adalah suatu yang mutlak keberadaannya, atau memiliki peranan penting dalam dunia perpolitikan. Dikatakan sangat penting, karena politik itu secara

⁶⁰ *Op. Cit.*, h. 171-172.

⁶¹ *Ibid*, h. 173.

esensial adalah untuk memanusiakan manusia.⁶² Artinya pelaku politik adalah manusia, dan tujuan politik adalah untuk manusia dan kemanusiaan.⁶³ Kemudian tentunya politik Islam secara aksiologis mengandung nilai spiritual dan material bertujuan untuk kesejahteraan manusia baik lahir maupun bathin.⁶⁴

4. Keadilan Sosial

Keadilan sosial, menurut Masdar Farid yang dikutip oleh Himyari Yusuf ia menjelaskan. Adil secara harfiah berarti lurus atau seimbang, dan dalam fikih, adil pertama berarti memperlakukan setiap orang secara merata, tanpa diskriminasi. Dengan kata lain keadilan adalah kesetaraan.

Perbedaan agama, suku, ras, budaya misalnya tidak boleh dijadikan sebagai alasan atau dasar perlakuan yang diskriminatif. Pandangan Masdar Farid ini dapat diinterpretasikan bahwa keadilan adalah keseimbangan dan kesetaraan. Keseimbangan dan kesetaraan tersebut bisa diartikan sebagai keadilan yang tauhidi. Artinya nilai keadilan sosial adalah suatu keseimbangan antara lahir dan batin.⁶⁵

Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat disegala bidang kehidupan, baik materil maupun spiritual.⁶⁶ Nilai keadilan

⁶² *Ibid*, h. 174.

⁶³ *Ibid*, h. 175.

⁶⁴ Himyari Yusuf, *Eksistensi Karakteristik Politik Islam Suatu Inspirasi Bagi Formulasi Politik Kontemporer*, (Jurnal Tapis, Vol, 10 No. 1 Januari-Juni 2014), h. 113.

⁶⁵ *Op. Cit.*, h. 177.

⁶⁶ *Loc. Cit.*, h.42.

yang terbangun dari prinsip tauhidi inilah yang menurut filsafat politik Islam keadilan yang harus diperjuangkan dan diaktualisasikan oleh pemegang kekuasaan di suatu negara yang sedang berkuasa, karena hanya dengan prinsip keadilan semacam inilah yang dapat melahirkan keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia.

Filsafat politik Islam memandang nilai keadilan merupakan bagian tak terpisahkan dari tujuan dan cita-cita luhur masyarakat bangsa. Ini merupakan bagian dari tujuan negara, maka sudah seharusnya bagi seluruh komponen anak bangsa untuk bersikap konsisten terhadap tujuan negara tersebut. Nilai keadilan sosial ini harga mati yang memang harus diwujudkan secara kongkrit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.⁶⁷ Hakikat keadilan sosial ini seperti yang dinyatakan dalam alenia kedua dalam pembukaan UUD 1945. “....Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur...”.⁶⁸ Pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah keadilan sosial ini sudah terwujud di negeri ini? Jawabannya adalah belum.

Nilai kemanusiaan yang berkeadilan pada hakikatnya belum terwujud secara nyata dinegeri ini, demikian menurut Ramsi Nur'at yang dikutip oleh Himyari Yusuf. Padahal menurut tujuan dan hakikat yang terkandung didalamnya adalah mewajibkan semua anggota masyarakat

⁶⁷ *Op. Cit.*, h. 178.

⁶⁸ *Op. Cit.*, h. 43.

mulai dari pemimpin negara sampai rakyat jelata untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika, moral agar mampu berbuat adil serta bijaksana.

Nilai kemanusiaan yang adil dan beradab harus dijadikan sebagai dasar untuk mengetaskan persoalan moralitas dan ketidakadilan yang terjadi di negeri ini. Pandangan Ramsi tersebut mengisyaratkan bahwa nilai kemanusiaan dan keadilan harus menjadi perhatian yang serius untuk direalisasikan secara baik dan konsekuen, sehingga keadilan sosial yang merupakan bagian dari hakikat kemanusiaan dapat dirasakan secara kongkrit dan merata oleh seluruh masyarakat bangsa dan negara Indonesia.

Dalam pandangan filsafat politik Islam nilai kemanusiaan dan keadilan adalah dua sisi yang tidak terpisahkan. Nilai kemanusiaan sejatinya mengandung aspek keadilan, dan nilai keadilan sosial berpijak dari kemanusiaan. Dalam filsafat politik Islam selain menempatkan sumber politik tertinggi adalah Tuhan, dan semua kebijakan harus mengalir dari nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Filsafat politik Islam juga menekankan tentang keharusan akan keadilan.⁶⁹

Pada masa pemerintahan Rasulullah di Madinah, Rasulullah sangat mengutamakan sikap kebersamaan, kesamaan, kerukunan, dan kekeluargaan, sehingga terwujudlah keadilan sosial bagi seluruh masyarakat bangsa dan negara. Mewujudkan nilai kemanusiaan dan

⁶⁹ *Op. Cit.*, h. 179.

keadilan sosial selain titah Tuhan yang terkandung dalam al-Quran, juga karena tuntutan hakikat dan kodrat manusia.⁷⁰

5. Nilai musyawarah dan Perwakilan/Demokrasi

Dalam demokrasi perwakilan, aspirasi masyarakat atau warga didelegasikan kepada anggota parlemen atau kongres yang mengikuti pemilihan sebagai wakil partai politik. Selain itu juga politisi mempunyai tujuan untuk mendapatkan suara yang sebesar-besarnya, sedangkan tujuan konstituen (pendukung) adalah memaksimalkan perolehan neto dalam kebijakan fiskal. Dengan demikian, konstituen akan memilih para wakil yang mampu mewakili kepentingan mereka, sedangkan para politisi akan menawarkan program-program yang mampu memenuhi kepentingan para pendukungnya.⁷¹

Musyawarah adalah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional yang pokok di atas prinsip-prinsip umum dan dasar-dasar baku yang telah diterapkan oleh *nash-nash* al-Quran dan hadist-hadist nabawi. Oleh karena itu, musyawarah ini lazim dan tidak ada alasan bagi seseorang pun untuk meninggalkannya.⁷²

Musyawarah bukan hanya sebuah pengakuan akan adanya pluralisme, melainkan juga kesadaran dan peraktek memperlakukan orang

⁷⁰ *Ibid*, h. 180.

⁷¹ Hudyanto, *Ekonomi Politik*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2008), h. 16.

⁷² *Loc. Cit.*, h. 35.

per orang sederajat. Oleh karena itu menurut Ayi Sofyan bahwa dasar dari musyawarah adalah keadilan yang begitu ditekankan oleh al-Quran.

Secara substansial musyawarah mencerminkan monopoli “kebenaran”. Mengenal ikhwal peri kehidupan, yang tidak mungkin dilakukan, karena masing-masing orang atau kelompok masyarakat berbeda pandangan dalam satu hal strategis. Oleh karena itu, musyawarah adalah sebuah mekanisme operasional dalam menemukan *common platform* diantara keberagaman itu.⁷³ Dalam konteks ke-Indonesiaan nilai musyawarah ini diambil dari alenia keempat pembukaan UUD 1945 dan Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sebetulnya pada pembahasan sebelumnya sudah di bahas bahwa nilai yang terkandung adalah nilai musyawarah itu sendiri.⁷⁴

Namun tidak sampai disitu, ada beberapa lagi nilai-nilai yang terkandungnya. Seperti nilai kedaulatan rakyat, dan yang menjadi perwakilan untuk musyawarah juga adalah rakyat, oleh karena itu kedaulatan negara disebut juga kedaulatan rakyat, yang terkenal dengan istilah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Inilah sejatinya demokrasi pancasila untuk bangsa Indonesia.

⁷³ *Loc. Cit.*, h. 329.

⁷⁴ *Op. Cit.*, h. 180.

Negara Indonesia ini bukan negara untuk satu orang saja atau golongan tertentu, tapi kita mendirikan negara, semua untuk semua, satu buat semua, semua buat satu.⁷⁵ Seperti pidato Bung Karno.

*“dasar itu ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan... kita mendirikan negara ‘semua buat semua’, satu buat semua, semua buat satu. Saya yakin, bahwa syarat mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan... apa-apa yang belum memuaskan, kita bicarakan di dalam permusyawaratan”*⁷⁶

Dari pidato di atas Bung Karno menegaskan bahwa negara Indonesia memilih sistem permusyawaratan, perwakilan. Ini artinya Indonesia bukan negara feodal dan bukan negara oteriter.⁷⁷ Maka demokrasi Indonesia bukanlah demokrasi model barat yang *liberalisme kapitalisme* dan *sosialisme komunisme*, tetapi demokrasi pancasila yang isinya permusyawaratan, perwakilan.

Korelasi pandangan hidup seperti itu ialah sikap terbuka kepada sesama manusia, dalam bentuk kesediaan yang tulus untuk menghargai pikiran dan pendapat mereka yang otentik, kemudian mengambil dan mengikuti mana yang terbaik.⁷⁸ Menurut Nurcholish Madjid yang dikutip oleh Ayi Sofyan, sikap keterbukaan seperti ini merupakan konsekuensi

⁷⁵ *Ibid*, h. 181.

⁷⁶ *Loc. Cit.*, h. 30.

⁷⁷ *Op. Cit.*, h. 181.

⁷⁸ *Ibid*, h. 182.

tauhid. Sebab, tauhid berakibat pembebasan manusia dari segala macam kepercayaan palsu seperti mitologi.⁷⁹

Keterbukaan, menurut Nurcholish ini, membuka pintu partisipasi rakyat umum. Artinya, pemimpin dalam masyarakat diciptakan melalui proses pemilihan terbuka, dengan cara apa pun pemilihan itu dilakukan dalam kenyataan dan menyesuaikan keadaan. Oleh karena itu, masyarakat bisa dikatakan sebagai rumah demokrasi. Dengan keterbukaannya, terbuka pula partisipasi rakyat umum sebagai hak untuk memberikan suara secara bermakna dan bebas dari paksaan.

Keterbukaan dalam masyarakat, menurut Nurcholish dengan mengutip Robert N. yang dikutip oleh Ayi Sofyan, menunjukkan adanya konsep tentang aturan politik berdasarkan partisipasi umum, termasuk keterlibatan dari kalangan rakyat jelata sebagai anggota masyarakat.

Oleh karena itu, dalam pandangan Nurcholish, keterbukaan memberikan kepada setiap orang untuk menyatakan pendapatnya sebagai penilaian.⁸⁰ Terhadap kedudukan kepemimpinan atau apa pun terhadap sesama manusia pada umumnya. Keterbukaan ini, jika dilaksanakan dengan baik, akan melahirkan budaya musyawarah dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁷⁹ *Loc. Cit.*, h. 86.

⁸⁰ *Ibid*, h. 87.

Sikap terbuka dari masing-masing manusia, dalam bentuk yang tulus untuk saling menghargai pemikiran dan pendapat, sehingga menemukan solusi atau pendapat yang otentik. Kemudian mengambil dan mengikuti mana yang terbaik, menurut Nurcholish Madjid, adalah makna yang sebenarnya dari demokrasi.⁸¹ Karena konsep demokrasi yang ada di negara kita Indonesia ini adalah demokrasi Pancasila. Yang menurut Zuhri yang dikutip oleh Masykuri Abdillah, bahwa konsep demokrasi Pancasila adalah sebagai suatu bentuk demokrasi yang mempunyai standar moral tinggi, karena demokrasi ini mempertahankan nilai ketuhanan serta nilai-nilai yang lainnya.⁸²

Dalam pandangan filsafat politik Islam nilai demokrasi adalah sebagai bentuk perwujudan dari nilai ketuhanan, dan nilai kemanusiaan. Ini sebagai bentuk pengakuan hak-hak asasi manusia sebagai penghargaan terhadap martabat manusia dengan tidak melupakan kepentingan umum.⁸³ Pandangan ini dapat diinterpretasikan bahwa pilihan terhadap sistem permusyawaratan atau musyawarah menunjukkan adanya sikap keterbukaan dan keikhlasan untuk menghargai dan menerima pemikiran serta pendapat orang lain yang dianggap baik.⁸⁴

⁸¹ *Ibid*, h. 88.

⁸² Masykuri Abdillah, *Islam Dan Demokrasi, Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Konsep Demokrasi 1966-1993*, Edisi Revisi, (Jakarta, PT Fajar Interpretama Mandiri, 2015), h. 181.

⁸³ *Loc. Cit.*, h. 236.

⁸⁴ *Op. Cit.*, h. 182.

Selanjutnya Nurcholish, yang dikutip oleh Ayi Sofyan menjelaskan. Keterbukaan adalah kerendahan hak untuk tidak merasa selalu benar, kemudian kesediaan mendengarkan pendapat orang lain yang untuk kemudian diambil dan diikuti yang terbaik. Dalam masyarakat atau negara, keterbukaan seperti inilah yang berimplikasi pada terwujudnya musyawarah yang pada hakikatnya merupakan interaksi positif sebagai individu dalam masyarakat yang saling mengakui adanya kewajiban mendengarkan pendapat itu.⁸⁵

Sikap keterbukaan dan keikhlasan serta menerima pendapat yang terbaik menjadi semangat yang mewarnai jalannya musyawarah. Oleh karena itu, paradigma tersebut dalam pandangan filsafat politik Islam merupakan ikhwal yang sangat penting dalam politik yang dilakukan oleh suatu kekuasaan, karena hanya dengan sikap keterbukaan dan keikhlasan itu dalam suatu permusyawaratan dapat melahirkan kebijakan-kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat bangsa dan negara.

Dalam pelaksanaan musyawarah semacam ini mendorong untuk terbangun sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling mempercayai.⁸⁶ Menurut Nurcholish Madjid yang dikutip oleh Ayi Sofyan, musyawarah pada hakikatnya adalah interaksi positif sebagai individu dalam masyarakat yang saling member hak untuk menyatakan

⁸⁵ *Op. Cit.*, h. 89.

⁸⁶ *Op. Cit.*, h. 182-183.

pendapat, dan saling mengakui adanya kewajiban mendengarkan pendapat itu. Dengan kata lain, musyawarah ialah hubungan interaktif untuk saling mengikatkan kebenaran dan kebaikan serta ketabahan dalam mencari penyelesaian masalah bersama dalam suasana persamaan hak dan kewajiban antarwarga masyarakat.⁸⁷

Dalam pandangan filsafat politik Islam, musyawarah merupakan wadah dalam memilih dan menentukan kebijakan dan langkah-langkah yang terbaik untuk kepentingan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian selain itu nampak jelas bahwa sistem musyawarah yang dilandasi nilai ketuhanan tidak akan mendukung sistem pemerintahan tirani.⁸⁸ Serta konstitusi monarki, oligarki serta pemerintahan minoritas.⁸⁹ Yang hanya akan menghancurkan harkat dan martabat kemanusiaan.

Karena sistem pemerintahan semacam itu tidak sesuai dengan pandangan yang menempatkan nilai ketuhanan sebagai landasan dan pendorong untuk kebersamaan, kesamaan dan sistem permusyawaratan dan perwakilan.⁹⁰ Karena dalam pandangan Islam, seorang pemimpin harus bermusyawarah dengan bawahannya untuk menyerap aspirasi. Inilah makna demokrasi yang muncul dari pemerintahan dengan sistem

⁸⁷ *Op. Cit.*, h. 91.

⁸⁸ *Op. Cit.*, h. 183.

⁸⁹ *Loc. Cit.*, h. 259.

⁹⁰ *Op. Cit.*, h. 183.

musyawarah.⁹¹ Karena menurut Nurcholis Madjid yang dikutip oleh Himyari Yusuf, mengemukakan bahwa, musyawarah merupakan suatu keharusan karena manusia mempunyai kekuatan dan kelemahan yang tidak sama dari individu keindividu lainnya.

Pandangan Nurcholish ini, memberikan suatu pandangan bahwa musyawarah merupakan suatu keharusan, yang paling utama adalah dalam membangun kekuatan dan kesamaan, karena di dalam permusyawaratan antar anggota akan saling memberikan dan menerima pandangan yang terbaik diantara yang baik, sehingga satu sama lain akan saling menguatkan. Karena dengan adanya musyawarah perbedaan pendapat dapat disatukan dalam suatu perbedaan (bhineka tunggal ika).⁹²

Menurut S Prajudi Atmosudirjo dkk yang dikutip oleh Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, ia mengatakan bahwa hakikat musyawarah untuk mufakat dalam kemurniannya adalah suatu tata cara khas yang bersumber pada inti paham kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan untuk merumuskan serta memutuskan suatu hal berdasarkan kehendak rakyat, dengan jalan mengemukakan hikmat kebijaksanaan yang tiada lain dari pada pikiran (rasio) yang mempertimbangkan persatuan dan kesatuan

⁹¹ *Op. Cit.*, h. 259.

⁹² *Op. Cit.*, h. 184.

bangsa.⁹³ Selain itu juga musyawarah dapat dimaknai sebagai metode atau cara, untuk mencari sekaligus menentukan suatu kebenaran. Artinya kebenaran yang dihasilkan dari musyawarah adalah merupakan kebenaran bersama karena disepakati dan diakui secara bersama-sama.

Dalam pandangan filsafat politik Islam musyawarah merupakan jalan terbaik untuk menyatukan pandangan dan menentukan suatu kebenaran bagi kehidupan manusia. Karena tanpa kesatuan pandangan, manusia tidak akan bisa mewujudkan kesatuan dan kesamaan. Yang terpenting adalah kebenaran yang disepakati bersama niscaya harus bersumber kepada nilai ketuhanan (al-Quran dan al-Hadist).⁹⁴ Dengan demikian, al-Quran memerintahkan penerapan prinsip-prinsip musyawarah, seperti dalam surat ke 4 ayat 59, Allah SWT berfirman. *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rosul (as-Sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.”* (Q.S. An-nisa’ {4}:59).⁹⁵ Dan Rasul pun sepanjang hidupnya menerapkan prinsip musyawarah tersebut. Diriwayatkan dari Abu

⁹³ Ahmad Sukardja dan Ahmad Sudirman Abbas, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam*, (Jakarta, Pedoman Ilmu Jaya Dengan Anglo Media, 2015), h. 148.

⁹⁴ *Op. Cit.*, h. 184.

⁹⁵ Ali Abdul Mu’ti Muhammad, *Filsafat Politik Antara Islam dan Barat*, Terjemah, Rosihon Anwar, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2010), h. 255.

Hurairah, ia berkata, “tidak ada seorang pun melebihi intensitas musyawarah Rasul dengan para sahabatnya.”⁹⁶

Bahkan Rasul, sering memilih gagasan teman musyawarahnya walaupun berbeda dengan pendapat Rasul sendiri. Diriwatkan pada waktu Perang Badar, Rasul menempatkan pasukannya didekat sumur Badar. Al-Habbab bin Al-Mundzir Al-Anshari kemudian bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah penempatan ini atas dasar wahyu ataukah atas dasar pendapatmu, strategi perang, dan tipu daya?” Rasul menjawab, “hanya pendapatku, strategi perang, dan tipu daya.” Al-Habbab berkata lagi, “Wahai Rasulullah, tempat ini tidak strategis. Bagaimana kalau pasukan kita, dipindahkan ke tempat yang dekat dengan sumber air kaum di atas? Dari sana, kita dapat mengawasi musuh. Kita pun dapat membangun penampungan air di sana, sedangkan mereka tidak.” Rasulullah SAW. Bersabda, “saya setuju dengan gagasan itu.” Kemudian, Rasul pun memindahkan pasukannya ketempat itu.⁹⁷ Sebagai contoh lagi, pada waktu Rasulullah SAW ingin menaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW memanggil para sahabatnya dalam rangka untuk bermusyawarah, bahwa beliau berencana menaklukan kota Mekah untuk menyerukan dakwah Islam di depan *Baitullahil Haram*.⁹⁸

⁹⁶ *Ibid*, h. 253.

⁹⁷ *Ibid*, h. 254.

⁹⁸ Abdul Razak Nawfal, *Tokoh-Tokoh Cendekiawan Muslim Sebagai Perintis Ilmu Pengetahuan Modern*, Penerjemah, Muhammadiyah Ja'far, (Jakarta, Radar Jaya Offset, 1999), h. 190.

Sebenarnya tidak sulit bagi Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Namun, Allah menghendaki supaya prinsip musyawarah ini menjadi prinsip bagi sistem politik dan sosial. Rasulullah pun memerintahkan menyelesaikan masalah dengan bermusyawarah. Rasulullah SAW bersabda, *“selesaikan urusan kalian dengan musyawarah Dengan musyawarah, suatu kaum akan ditunjukkan pada jalan penyelesaian yang paling baik.”* Orang yang bermusyawarah tidak akan menyesal. Kemudian jejak Rasulullah SAW diikuti oleh Khulafaur Rasyidin. Mereka tidak memutuskan sesuatu, kecuali setelah bermusyawarah.⁹⁹

Sistem musyawarah, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, baik yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya, atau pun oleh Rasul dalam Sunnah-Nya. Ini sekilas menggambarkan keberadaan demokrasi. Di antara makna demokrasi adalah memberikan ruang kepada rakyat untuk berpendapat, dan tidak memutuskan sesuatu, kecuali melalui jalan musyawarah.

Sebenarnya demokrasi Islam telah tegak di atas dasar sistem musyawarah ini. Indikasinya Islam mengakui adanya pertanggungjawaban individu, menjadikan hak-hak umum sebagai sesuatu yang sama di antara manusia, dan menguatkan solidaritas antar rakyat meskipun berbeda-beda

⁹⁹ *Op. Cit.*, h. 254.

kelas sosialnya.¹⁰⁰ Dari rangkaian penkajian nilai-nilai di atas, secara kontemplatif, khususnya dalam pandangan filsafat politik Islam menunjukkan bahwa nilai musyawarah adalah sentral dalam hal konkretisasi dari seluruh nilai-nilai yang terkandung di dalam empat pilar kebangsaan. Karena dalam pelaksanaan musyawarah/permusyawaratan yang melalui perwakilan haruslah mengkaitkan beberapa nilai di dalamnya.

Misalnya dalam melaksanakan musyawarah niscaya ada nilai kesatuan dan persatuan, nilai kesamaan dan kebersamaan, dapat dipastikan musyawarah semacam ini akan berjalan sebagaimana mestinya. Tidak kalah penting juga adalah nilai kemanusiaan, karena yang diperjuangkan dalam permusyawaratan itu adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan manusia (rakyat) Indonesia, dan manusia yang menjadi wakil harus memegang komitmen kemanusiaan secara mantap.¹⁰¹ Yang pada intinya nilai musyawarah dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan, dan memang nilai ketuhanan ini dijadikan sebagai sentral yang menjiwai seluruh nilai-nilai di atas.

6. Nilai Toleransi

Seperti yang sudah penulis jelaskan sedikit dalam BAB II, bahwa nilai toleransi ini sangat penting untuk selalu diimplementasikan dalam

¹⁰⁰ *Ibid*, h. 255-256.

¹⁰¹ *Op. Cit.*, h. 189-190.

kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, dengan tujuan untuk mencegah dari pada sikap diskriminasi yang mengakibatkan perpecahan hanya karena adanya perbedaan suku, ras, budaya, bahasa, dan agama. Nilai toleransi ini sangat berimplikasi dengan nilai-nilai fundamental lainnya seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, dan nilai persatuan. Nilai toleransi dalam perspektif filsafat politik Islam merupakan kodrat dari kemanusiaan itu sendiri. Secara esensial nilai toleransi ini adalah sebagai perwujudan dari nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Yang lebih mendasar dari ketiga nilai tersebut adalah nilai ketuhanan.

Relevan dengan pendapat Himyari Yusuf bahwa nilai ketuhanan ini haruslah diposisikan sebagai sumber dari seluruh kebijakan dan berbagai peraturan. Bahkan dapat dipastikan dengan berdasarkan nilai ketuhanan inilah semua aktivitas masyarakat, berbangsa dan bernegara akan berjalan sesuai dengan tujuan serta hakikat daripada kemanusiaan.¹⁰² Begitu pentingnya nilai ketuhanan dalam peraturan dan kebijakan negara. Karena untuk mewujudkan nilai kemanusiaan haruslah terlebih dahulu mengamalkan nilai ketuhanan sehingga akan terwujud nilai kemanusiaan, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban serta saling menyayangi sesama manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dari sinilah akan terwujud nilai toleransi, nilai persatuan, nilai permusyawaratan/demokrasi, dan keadilan sosial.

¹⁰² *Ibid*, h. 160.

Pandangan filsafat politik Islam terhadap nilai toleransi selain perwujudan dari nilai ketuhanan dan nilai kemanusiaan. Nilai toleransi dalam pandangan filsafat politik Islam juga adalah sebagai bentuk ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dengan ketakwaan kepada Allah SWT maka akan lahir sikap kebersamaan, kesamaan hak, serta sikap saling menghormati dan menerima perbedaan. Karena pada hakikatnya semua manusia dihadapan Allah adalah sama, kecuali ketakwaannya.

Relevan dengan pendapat Himyari Yusuf bahwa kesadaran semacam ini niscaya akan melahirkan sikap kerendahan hati, keikhlasan berpikir, melahirkan kasih sayang terhadap sesama manusia.¹⁰³ Toleransi dalam pandangan Islam disebut *tasamuh* yang artinya kemudahan. Secara definitif islam memudahkan bagi setiap pemeluk agama menjalankan apa saja yang mereka yakini. Di dalam Islam-pun sudah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 256.

Yang artinya: *“tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat”*.

Artinya al-Quran pun sudah menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan orang lain, tidak boleh dilakukan dengan cara pemaksaan, karena agama adalah pilihan, jadi seseorang tidak boleh memaksa orang lain untuk memeluk agama tertentu. Kesamaan hak, dan kebebasan

¹⁰³ *Ibid*, h. 162.

memeluk agama ini nampaknya sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 pada BAB XA Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 28A dan Pasal 28E yang berbunyi.

Pasal 28A:

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”¹⁰⁴

Pasal 28E

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.¹⁰⁵

Artinya untuk setiap, atau seruh warga negara Indonesia tanpa harus membedakan satu etnis ke etnis lainnya, berhak untuk mempertahankan hak untuk hidup atau berkehidupan sebagai warga negara Indonesia.

Dalam pandangan filsafat politik Islam nilai toleransi adalah dipandang sebagai perwujudan dari pada Islam *Rahmatan lil'amin*, Islam yang membawa kedamaian. Yang mana Indonesia adalah negara yang pluralistik, beragam, namun mayoritas Islam. Tentunya Islam sebagai mayoritas haruslah mampu menjadi garda terdepan untuk memperjuangkan keutuhan negara kesatuan republik Indonesia (NKRI).

Nilai toleransi dalam pandangan filsafat politik Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kerukunan antar umat beragama serta

¹⁰⁴ *Loc. Cit.*, h. 176.

¹⁰⁵ *Ibid*, h. 177.

melahirkan persatuan dan kesatuan serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penjelasan di atas sangat relevan dengan pendapatnya Toto Suryana menurutnya:

“Urgensi kerukunan adalah untuk mewujudkan kesatuan pandangan dan kesatuan sikap, guna melahirkan kesatuan perbuatan dan tindakan serta tanggung jawab bersama, sehingga tidak ada lagi pihak-pihak yang melepaskan diri dari tanggung jawab atau menyalahkan pihak lain. Dengan kerukunan umat beragama menyadari bahwa masyarakat dan negara adalah milik bersama. Dan menjadi tanggung jawab bersama untuk memeliharanya. Karena itu, kerukunan hidup umat beragama bukanlah kerukunan sementara, bukan pula kerukunan politis, tatapi kerukunan hakiki yang dilandasi dan dijiwai oleh agama masing-masing”.¹⁰⁶

Secara historis konsep seperti ini nampaknya sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terbukti di dalam Piagam Madinah secara eksplisit tertulis nama beberapa golongan seperti Kaum Muslimin, Kaum Musyrikin, dan Kaum Yahudi. Bahkan sebelum Muhammad datang ke Madinah, perselisihan antara masing-masing kelompok, suku sering terjadi. Tetapi kemudian Islam yang meredam perselisihan tersebut, membawa mereka ke suasana damai dan kerukunan.¹⁰⁷ Ini bukti bahwa Islam bukanlah teroris, melainkan sebagai jembatan perdamaian negara.

Sejalan dengan kebijakan Rasulullah SAW yang dituangkan di dalam Piagam Madinah. Di dalam Piagam tersebut tertulis kalimat-kalimat yang mengandung arti yang mengarah kepada persatuan, kesatuan

¹⁰⁶ Toto Suryana, *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam- Ta'lim. 9 No. 2-2011), h. 134-135.

¹⁰⁷ *Loc. Cit.*, h. 98.

serta toleransi. Seperti yang telah dijelaskan dipembahasan sebelumnya. Pada Pasal 16 misalnya “orang Yahudi yang mengikuti kita, berhak atas pertolongan dan bantuan”.¹⁰⁸ Seperti pada Pasal 37 “bagi kaum Yahudi ada kewajiban biaya, dan Kaum Muslimin ada kewajiban biaya. Mereka bantu membantu dalam menghadapi musuh. Mereka saling memberi saran dan nasehat”.¹⁰⁹ Artinya, Rasulullah SAW tampaknya sama sekali tidak berpikir hendak memusuhi atau menyingkirkan mereka orang yang di luar Islam. Melainkan Rasul mengikat perjanjian untuk hidup berdampingan dan bekerja sama seperti yang dijelaskan di atas.



¹⁰⁸ *Ibid*, h. 99.

¹⁰⁹ *Ibid*, h. 55.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian yang telah peneliti paparkan di atas yang berdasarkan rumusan masalah dari penelitian “*Empat Pilar Kebangsaan Pespektif Filsafat Politik Islam*”, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adapun nilai-nilai fundamental empat pilar kebangsaan yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai toleransi, nilai musyawarah/demokrasi (kedaulatan rakyat), dan nilai keadilan sosial.
2. Nilai ketuhanan dalam pandangan filsafat politik Islam adalah sumber tertinggi sebagai aturan dan kebijakan-kebijakan dalam negara. Kemudian nilai ketuhanan juga adalah sentral bagi seluruh kehidupan manusia, yang akan melahirkan kesadaran bahwa segala sesuatu yang dilakukan akan dipertanggung jawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. Kemanusiaan dalam pandangan filsafat politik Islam adalah sesuatu yang mutlak yang harus ada keberadaannya, tujuannya adalah untuk mensejahterakan manusia baik lahir maupun bathin. Persatuan dalam pandangan filsafat politik Islam adalah persatuan seluruh umat manusia, tidak perduli dari agama, dan etnis mana, semua didudukan setara, seperti yang dilakukan Rasulullah SAW.

Dan ini sangat berimplikasi dengan nilai toleransi. Toleransi dalam pandangan filsafat politik Islam adalah untuk menciptakan kedamaian

diatas kebhinekaan. Musyawarah/Demokrasi dalam pandangan filsafat politik Islam adalah sebagai kewajiban keislaman, sebagai bentuk perwujudan dari nilai ketuhanan dan kemanusiaan, sebagai bentuk pengakuan hak asasi manusia. Sedangkan yang terakhir adalah keadilan sosial.

Dalam pandangan filsafat politik Islam keadilan sosial adalah keadilan yang harus diaktualisasikan oleh siapa saja yang berkuasa. Karena hanya dengan nilai inilah yang dapat melahirkan keadilan yang merata bagi seluruh umat manusia.

B. Saran

Pada bagian berikut ini peneliti ingin menyampaikan beberapa hal, yang berupa saran-saran terkait dengan penulisan ini.

1. Peneliti ingin menyampaikan bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekeliruan, kekurangan serta jauh dari kesempurnaan. Penulis berharap pembaca dapat memakluminya.
2. Empat pilar kebangsaan juga tidak melulu bisa dikaji dari sudut pandang satu keilmuan saja. Melainkan bisa dengan keilmuan lainnya, seperti Contoh dalam penelitian ini **Empat Pilar Kebangsaan Perspektif Filsafat Politik Islam**, jika peneliti lain ingin mengkaji empat pilar juga, bisa dengan filsafat moral. Seperti **Empat Pilar Kebangsaan Dalam Perspektif Filsafat Moral**.

3. Kemudian penulis juga ingin menyampaikan bahwa dari keempat pilar tersebut, sangat mungkin salah satunya dijadikan bahan penelitian saudara. Bahkan menurut penulis jika saudara meneliti salah satu dari empat pilar tersebut, itu akan lebih efektif.



DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqi, Jimly, “Sudah Dibatalkan MK, Frasa Empat Pilar Kebangsaan Jangan Digunakan Lagi” (On-line), tersedia di: <https://nasional.kompas.com> (18 Mei 2015).
- Anwar, M. Ahmadi, *Prinsip-prinsip Metodologi Reaserch*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Abbas, Ahmad Sudirman dan Sukardja, Ahmad, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya Dengan Anglo Media, 2015.
- Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- _____, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- _____, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: KANISIUS, 1990.
- Baharudin, Muhammad, *Dasar Dasar Filsafat*, Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Daman, Rozikin, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Hamdayama, Jumanta dan Herdia, Heri wanto, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Ikadianhumairohsuparyat, “Politik Islam Era Orde Lama” (On-line), tersedia di: <https://ikadianhumairohsuparyat.wordpress.com> (25 Juli 2013).
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, Offset, 1999.
- _____, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta, Paradigma, 2016.
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paramadina, 2005.

_____, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2014.

Khalik, Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Penerjemah Faturrahman A. Hamid, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.

Kamil, Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013.

Krisnayuda, Backy, *Pancasila Dan Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Muhammad, Ali Abdul Mu'ti, *Filsafat Politik Antara Islam dan Barat*, Terjemah, Rosihon Anwar, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2017.

Nasution, Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Jakarta: UI-Press, 1985.

Nawfal, Abdul Razak, *Tokoh-Tokoh Cendekiawan Muslim Sebagai Perintis Ilmu Pengetahuan Modern*, Penerjemah, Muhammadiyah Ja'far, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1999.

Fransiska, Ninditya, "PKB Tolak Pancasila Sebagai Pilar Kebangsaan" (On-line), tersedia di: <https://m.antaranews.com> (7 April 2013).

Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012.

_____, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2017.

_____, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, Edisi Revisi, 2017.

"Politik dan Islam: Orde Baru dan Era Reformasi". (On-line), tersedia di: retorics.blogspot.com (28 Februari 2015).

- Ruslan, Idrus, *Negara Madani Aktualisasi Nila-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Yogyakarta: Suka Press, 2015.
- Sutono, *Filsafat Sosial Dan Politik Pancasila*, Yogyakarta: Andi Offset, 1985.
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: PT Kanisius, 1987.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lukman Offset, 1999.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2003.
- Syafiie, Inu Kencana, *Al-Quran dan Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- _____, *Filsafat Politik*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sutrisno, Slamet, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Hak Cipta, 2006.
- Sofyan, Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Syarbaini, Syahril, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) Di Perguruan Tinggi*, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sukarno, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2017.
- Suryana, Toto, *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jurnal Pendidikan Agama Islam:- Ta'lim. 9 No. 2-2011.
- Kiemas, Taufiq, "Sejarah Gagasan Empat Pilar". (On-line), tersedia di: [http://m. detik. Com](http://m.detik.com) (10 Juni 2013).
- Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Wahjono, Padmo, *Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Yusuf, Himyari, *Pergumulan Pemikiran Politik Kontemporer Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global*, Jurnal Tapis: Vol, 8 No. 2 Juli-Desember 2012.

_____, *Dasar-Dasar Aksiologi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Filsafat Politik Islam*, Bandar Lampung: An-Nuur Press, 2013.

_____, *Eksistensi Karakteristik Politik Islam Suatu Inspirasi Bagi Formulasi Politik Kontemporer*, Jurnal Tapis: Vol, 10 No. 1 Januari-Juni 2014.



DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqi Jimly, "Sudah Dibatalkan MK, Frasa Empat Pilar Kebangsaan Jangan Digunakan Lagi" (On-line), tersedia di: <https://nasional.kompas.com> (18 Mei 2015).
- Anwar M. Ahmadi, *Prinsip-prinsip Metodologi Reaserch*, Yogyakarta: Sumbangsih, 1975.
- Sukardja Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945 Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat Yang Majemuk*, Jakarta: UI-Press, 1995.
- Abbas Ahmad Sudirman dan Sukardja Ahmad, *Demokrasi Dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya Dengan Anglo Media, 2015.
- Bakker Anton dan Achmad Charris Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1983.
- _____, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984.
- _____, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: KANISIUS, 1990.
- Baharudin Muhammad, *Dasar-Dasar Filsafat*, Bandar Lampung: Harakindo Publishing, 2013.
- Budiardjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Daman Rozikin, *Pancasila Dasar Falsafah Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Hudiyanto, *Ekonomi Politik*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008.
- Hamdayama Jumanta dan Herdia Heri wanto, *Cerdas, Kritis, dan Aktif Berwarganegara*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Ikadianhumairohsuparyat "Politik Islam Era Orde Lama" (On-line), tersedia di: <https://ikadianhumairohsuparyat.wordpress.com> (25 Juli 2013).
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Yogyakarta: Paradigma, Offset, 1999.
- _____, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta: Paramadina, 2005.
- _____, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2014.

- Kencana Inu, *Al-Quran dan Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.
- Khalik Farid Abdul, *Fikih Politik Islam*, Penerjemah Faturrahman A. Hamid, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Kamil Sukron, *Pemikiran Politik Islam Tematik Agama dan Negara, Demokrasi, Civil Society, Syariah dan HAM, Fundamentalisme, dan Antikorupsi*, Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2013.
- Krisnayuda Backy, *Pancasila Dan Undang-Undang Relasi Dan Transformasi Keduanya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Muhammad Mu'ti Abdul Ali, *Filsafat Politik Antara Islam dan Barat*, Terjemah, Rosihon Anwar, Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2017.
- Nasution Harun, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspek*, Jakarta: UI-Press, 1985.
- Nawfal Razak Abdul, *Tokoh-Tokoh Cendekiawan Muslim Sebagai Perintis Ilmu Pengetahuan Modern*, Penerjemah, Muhammadiyah Ja'far, Jakarta: Radar Jaya Offset, 1999.
- Ninditya Fransiska, "PKB Tolak Pancasila Sebagai Pilar Kebangsaan" (On-line), tersedia di: <https://m.antaranews.com> (7 April 2013).
- Pimpinan MPR Dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2012.
- _____, *Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2017.
- _____, *Bahan Tayang Materi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI*, Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, Edisi Revisi, 2017.
- "Politik dan Islam: Orde Baru dan Era Reformasi" (On-line), tersedia di: retorics.blogspot.com (28 Februari 2015).
- Ruslan Idrus, *Negara Madani Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara*, Yogyakarta: Suka Press, 2015.

- Sutono, *Filsafat Sosial Dan Politik Pancasila*, Yogyakarta: Andi Offset, 1985.
- Suseno Franz Magnis, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta: PT Kanisius, 1987.
- Soejadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Lukman Offset, 1999.
- Sjadzali Munawir, *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 2003.
- Syafiie Inu Kencana, *Filsafat Politik*, Bandung: Mandar Maju, 2005.
- Sutrisno Slamet, *Filsafat dan Ideologi Pancasila*, Yogyakarta: Hak Cipta, 2006.
- Sofyan Ayi, *Etika Politik Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Syarbaini Syahril, *Pendidikan Pancasila (Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa) Di Perguruan Tinggi*, Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.
- Sukarno Ir, *Filsafat Pancasila Menurut Bung Karno*, Yogyakarta: Media Pressindo, 2017.
- Suryana Toto, *Konsep Dan Aktualisasi Kerukunan Antar Umat Beragama*, Jurnal Pendidikan Agama Islam: - Ta'lim. 9 No. 2-2011.
- Taufiq Kiemas dan Sejarah Gagasan Empat Pilar” (On-line), tersedia di: [http://m. detik. Com](http://m.detik.com) (10 Juni 2013).
- Varma, *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010.
- Wahjono Padmo, *Negara Republik Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Yusuf Himyari, *Pergumulan Pemikiran Politik Kontemporer Menjelajah Urgensi Politik Islam Pada Era Global*, Jurnal Tapis: Vol, 8 No. 2 Juli-Desember 2012.
- _____, *Dasar-Dasar Aksiologi Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Perspektif Filsafat Politik Islam*, Bandar Lampung: An-Nuur Press, 2013.
- _____, *Eksistensi Karakteristik Politik Islam Suatu Inspirasi Bagi Formulasi Politik Kontemporer*, Jurnal Tapis: Vol, 10 No. 1 Januari-Juni 2014.